

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Studi tentang kebijakan publik terus berkembang seiring dengan meningkatnya kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan negara. Kebijakan publik sebagai instrumen pemerintah dalam mengarahkan pembangunan serta menyelesaikan persoalan sosial, ekonomi, dan politik mengalami perubahan sejalan dengan dinamika lingkungan strategis. Pada tahap awal, kajian kebijakan publik lebih menekankan pendekatan administratif dan birokratis. Namun, seiring berkembangnya paradigma partisipatif dan demokratis, kebijakan publik kini dipahami sebagai proses yang lebih inklusif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Perkembangan teknologi, globalisasi, serta tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik turut mendorong transformasi dalam perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan agar lebih adaptif terhadap perubahan sosial dan ekonomi.

Dalam konteks tersebut, kebijakan publik dipahami sebagai rangkaian tindakan yang dipilih oleh pemerintah untuk merespons dan menyelesaikan permasalahan masyarakat (Dye, 2013:3). Proses kebijakan tidak berlangsung secara linear dan netral, melainkan melalui tahapan identifikasi masalah, penyusunan agenda, formulasi, adopsi, implementasi, dan evaluasi yang sarat

dengan interaksi kepentingan politik. Oleh karena itu, kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari proses politik yang melatarinya, baik dalam tahap perumusan maupun pelaksanaannya.

Keterkaitan erat antara kebijakan dan politik ditegaskan dalam kajian ilmu politik yang menempatkan kebijakan sebagai salah satu konsep utama dalam analisis kekuasaan dan pengambilan keputusan publik (Budiardjo, 2009:2). Kebijakan pada hakikatnya merupakan hasil dari serangkaian keputusan politik yang dibuat oleh individu atau kelompok yang memiliki otoritas, dengan tujuan mengalokasikan nilai dan sumber daya secara mengikat bagi masyarakat. Dengan demikian, kebijakan publik selalu mencerminkan relasi kekuasaan, kepentingan, dan negosiasi antaraktor yang terlibat dalam proses politik.

Berbagai hasil penelitian kebijakan publik menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan di tingkat pemerintah daerah jarang berlangsung secara murni teknokratis. Grindle (1980:1–23) menjelaskan bahwa kebijakan sektoral di negara berkembang dibentuk melalui proses politik yang sarat dengan negosiasi, kompromi, dan tarik-menarik kepentingan antaraktor. Dalam konteks ini, birokrasi dan elite politik sering berperan sebagai gatekeeper yang menentukan isu mana yang masuk ke dalam agenda kebijakan dan mana yang tersisih. Pandangan tersebut diperkuat oleh Sabatier dan Jenkins-Smith (1993:97) melalui Advocacy Coalition Framework

yang menegaskan bahwa kebijakan merupakan hasil interaksi koalisi aktor dengan keyakinan, kepentingan, dan sumber daya yang relatif stabil dalam jangka waktu tertentu.

Dinamika kebijakan di tingkat lokal juga sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan politik setempat. Wolman (1990:3–27) menegaskan bahwa kebijakan daerah mencerminkan kapasitas, prioritas, dan kepentingan aktor lokal, termasuk keterbatasan anggaran dan tekanan politik yang berkembang. Akibatnya, isu-isu tertentu sering kali kalah bersaing dalam agenda kebijakan daerah karena dianggap kurang strategis secara politik maupun elektoral.

Dalam konteks kebijakan kepemudaan, pemerintah dihadapkan pada tuntutan untuk merancang strategi pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas dan kualitas pemuda sebagai aktor pembangunan. Kebijakan kepemudaan mencakup berbagai aspek, mulai dari pendidikan, pelatihan keterampilan, kewirausahaan, hingga partisipasi aktif pemuda dalam kehidupan sosial dan politik. Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan prasyarat utama bagi keberlanjutan pembangunan nasional, dan pemuda memiliki peran strategis sebagai generasi penerus. Selain itu, olahraga sebagai bagian integral dari kebijakan kepemudaan tidak hanya berfungsi meningkatkan kesehatan fisik, tetapi juga membentuk karakter,

kedisiplinan, dan kerja sama sosial yang menjadi modal penting bagi generasi muda.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan menegaskan tanggung jawab negara dan pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi pemuda melalui kebijakan yang tepat. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kepemudaan di daerah masih menghadapi tantangan yang signifikan. Hambatan tersebut tidak hanya muncul pada tahap implementasi, tetapi telah berakar sejak tahap formulasi kebijakan. Edwards III (1980:9–20) dan Dwiyanto (2011:45–67) menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antarorganisasi, budaya birokrasi defensif, serta rendahnya komitmen politik menjadi faktor penghambat utama dalam proses kebijakan publik di daerah.

Dalam formulasi kebijakan kepemudaan dan keolahragaan, keterlibatan kelompok kepentingan merupakan keniscayaan. Teori Advocacy Coalition Framework menjelaskan bahwa kelompok-kelompok dengan kepentingan yang sama akan membentuk koalisi untuk mempengaruhi arah kebijakan (Sabatier dan Jenkins-Smith, 1993:97). Namun, berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa kekuatan advokasi organisasi pemuda dan komunitas olahraga sering kali lebih lemah dibandingkan dominasi kepentingan elite politik dan birokrasi daerah.

Partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan juga menjadi isu penting. Arnstein (1969:216–224) melalui konsep ladder of participation menunjukkan bahwa partisipasi publik sering kali berhenti pada tingkat konsultasi formal tanpa pengaruh substantif terhadap pengambilan keputusan. Kondisi ini diperkuat oleh pandangan Freeman (1984:12–25) dalam Stakeholder Theory yang menegaskan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan sering kali terhambat oleh keterbatasan akses, kapasitas, dan perhatian pemerintah terhadap kelompok-kelompok tertentu, termasuk pemuda.

Dalam konteks Kabupaten Maros, proses formulasi kebijakan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan berlangsung dalam dinamika politik lokal yang kompleks. Isu kepemudaan dan keolahragaan harus bersaing dengan sektor-sektor lain yang dianggap lebih prioritas dalam agenda pembangunan daerah. Teori Agenda Setting yang dikemukakan oleh Kingdon (2014:37–49) menjelaskan bahwa isu kebijakan dapat masuk ke agenda pemerintah apabila terjadi pertemuan antara arus masalah, arus kebijakan, dan arus politik. Dalam praktiknya, isu kepemudaan dan keolahragaan di tingkat daerah sering gagal menjadi agenda utama karena lemahnya advokasi, minimnya perhatian media, dan rendahnya prioritas politik terhadap sektor tersebut.

Proses formulasi kebijakan kepemudaan dan keolahragaan juga cenderung berlangsung secara inkremental. Lindblom (1959:79–88) menjelaskan bahwa kebijakan publik umumnya berkembang melalui perubahan-perubahan kecil sebagai hasil kompromi antaraktor, bukan melalui perubahan yang radikal. Selain itu, lemahnya jaringan kebijakan antaraktor turut mempengaruhi kualitas kebijakan yang dihasilkan. Marsh dan Smith (2000:4–21) menegaskan bahwa kebijakan publik merupakan hasil interaksi dalam jaringan kebijakan yang melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Ketika jaringan tersebut lemah, kebijakan yang dihasilkan cenderung tidak responsif terhadap kebutuhan kelompok sasaran.

Berbagai studi perbandingan internasional menunjukkan bahwa kebijakan kepemudaan yang efektif menempatkan pemuda sebagai aktor substantif dalam jaringan kebijakan, bukan sekadar objek kebijakan. Negara-negara seperti Singapura, Australia, Denmark, dan Jepang mengembangkan model kebijakan yang menekankan kolaborasi multiaktor, partisipasi berbasis bukti, serta penguatan kapasitas kelembagaan. Sebaliknya, di Indonesia, termasuk di Kabupaten Maros, partisipasi pemuda masih cenderung bersifat formalistik dan belum terintegrasi secara struktural dalam proses pengambilan keputusan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan kebijakan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan tidak semata-mata terletak pada aspek implementasi, tetapi berakar kuat pada proses politik formulasi kebijakan yang sarat kepentingan, berbagai faktor penghambat internal dan eksternal, serta keterbatasan model kebijakan yang digunakan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam proses politik dalam formulasi kebijakan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Maros, mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambatnya, serta merumuskan model formulasi kebijakan yang lebih adaptif, inklusif, dan kontekstual terhadap dinamika politik dan kelembagaan pemerintah daerah.

## **B. Pokok Masalah**

Pokok masalah dalam penelitian ini terletak pada bagaimana kebijakan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Maros dibentuk dalam konfigurasi politik lokal yang menempatkan sektor ini sebagai agenda marginal dalam pembangunan daerah. Proses formulasi kebijakan tidak berlangsung sebagai proses teknokratis berbasis kebutuhan empirik pemuda dan komunitas olahraga, melainkan sebagai arena negosiasi kekuasaan yang didominasi oleh aktor eksekutif dan legislatif dengan

pertimbangan politik pragmatis dan prioritas sektor lain yang dianggap lebih strategis secara elektoral.

Dalam praktiknya, isu kepemudaan dan keolahragaan mengalami keterlambatan regulasi, lemahnya dukungan anggaran, serta inkonsistensi perhatian kebijakan karena terus berkompetisi dengan agenda pembangunan lain seperti pariwisata. Kondisi ini terlihat jelas dari perdebatan di kalangan anggota DPRD yang berpusat pada implikasi anggaran (kekhawatiran beban APBD), keselarasan dengan RPJMD (prioritas pariwisata lebih tinggi), dan dampak elektoral (dukungan pemilih di dapil). Akibatnya, tuntutan substantif seperti pembangunan GOR, pusat pelatihan, atau Gedung Pemuda akhirnya disepakati dalam bentuk frasa normatif dan bertahap seperti “peningkatan dukungan” serta “secara bertahap”. Kompromi ini mencerminkan bahwa proses konversi input masyarakat menjadi output kebijakan cenderung dilemahkan oleh pertimbangan politik jangka pendek.

Masalah tersebut diperkuat oleh ketimpangan relasi kuasa antaraktor kebijakan. Organisasi kepemudaan dan komunitas olahraga masuk ke sistem kebijakan secara terfragmentasi dan dengan kapasitas advokasi yang lemah, sehingga tidak mampu membentuk tekanan politik kolektif yang berkelanjutan. Sebaliknya, aktor politik formal memiliki kontrol dominan atas agenda, tempo, dan substansi kebijakan.

Proses kebijakan juga sangat bergantung pada relasi informal dan kompromi elite, sementara mekanisme formal berbasis data, analisis kebijakan, dan partisipasi publik substantif belum berfungsi optimal. Akibatnya, penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda berlangsung tanpa basis bukti yang kuat dan menghasilkan kebijakan yang bersifat normatif, simbolik, serta incremental.

Lebih jauh, keterbatasan partisipasi pemuda akibat tekanan sosial ekonomi mempersempit representasi kelompok akar rumput dalam arena kebijakan. Aspirasi yang masuk ke sistem politik lebih banyak merefleksikan kepentingan aktor yang memiliki akses politik, bukan kebutuhan mayoritas pemuda dan komunitas olahraga.

Dengan demikian, pokok masalah penelitian ini bukan sekadar keterlambatan regulasi kepemudaan dan keolahragaan, tetapi kegagalan sistem politik daerah dalam mengintegrasikan sektor pemuda dan olahraga sebagai kebijakan strategis melalui tata kelola yang adil, berbasis bukti, dan berkelanjutan. Ketiadaan mekanisme yang mampu menyeimbangkan kekuasaan politik, kapasitas teknokratis, dan partisipasi publik menjadi akar stagnasi kebijakan di Kabupaten Maros.

### **C. Konteks Penelitian**

Penelitian ini berangkat dari dinamika formulasi kebijakan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Maros yang berlangsung dalam konteks politik daerah pasca-

desentralisasi, di mana pemerintah daerah memiliki kewenangan luas dalam menentukan prioritas pembangunan melalui dokumen perencanaan seperti RPJMD. Dalam konteks ini, kebijakan kepemudaan dan keolahragaan tidak hanya dibentuk melalui mekanisme teknokratis perencanaan pembangunan, tetapi melalui proses politik yang melibatkan negosiasi kepentingan antaraktor, tarik-menarik prioritas anggaran, serta konfigurasi kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan aktor non-negara.

Secara empiris, sektor kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Maros berada dalam posisi kompetitif dengan sektor pembangunan lain yang memiliki nilai politik lebih tinggi, seperti pariwisata. Kondisi ini menyebabkan isu pemuda dan olahraga sering kali tidak memperoleh perhatian kebijakan yang berkelanjutan, baik dalam perumusan regulasi maupun dalam alokasi anggaran daerah. Proses formulasi kebijakan menunjukkan bahwa perhatian terhadap sektor ini cenderung muncul secara sporadis mengikuti momentum tertentu, tetapi tidak terinstitusionalisasi sebagai agenda strategis jangka panjang.

Arena kebijakan kepemudaan dan keolahragaan di Maros ditandai oleh dominasi aktor politik formal, khususnya eksekutif daerah yang mengarahkan kebijakan sesuai visi-misi kepala daerah serta DPRD yang memegang peran kunci dalam pengesahan regulasi dan anggaran. Sementara itu, organisasi kepemudaan dan

komunitas olahraga terlibat dalam forum formal seperti Musrenbang RKPD dan konsultasi publik RPJMD, namun partisipasi mereka sebagian besar bersifat prosedural dan belum mampu memengaruhi substansi kebijakan secara signifikan. Pola ini mencerminkan ketimpangan relasi kuasa dalam jaringan kebijakan daerah.

Konteks politik tersebut diperkuat oleh keterbatasan kapasitas teknokratis birokrasi sektoral dalam menyusun kebijakan berbasis data dan analisis kebijakan yang komprehensif. Penyusunan Naskah Akademik dan rancangan regulasi kepemudaan serta keolahragaan masih lemah dalam pemetaan kebutuhan empirik pemuda dan kondisi riil pembinaan olahraga daerah. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan cenderung normatif, inkremental, dan tidak mampu menjawab ketimpangan struktural antarwilayah maupun antarkelompok pemuda.

Dari sisi aktor non-negara, fragmentasi organisasi kepemudaan dan komunitas olahraga membatasi terbentuknya tekanan politik kolektif yang berkelanjutan. Aspirasi masuk ke sistem kebijakan secara parsial dan mudah dinegosiasikan dalam arena politik formal. Kondisi sosial ekonomi pemuda, khususnya di wilayah pedesaan, semakin mempersempit ruang partisipasi substantif mereka dalam proses kebijakan, sehingga suara pemuda akar rumput jarang terartikulasikan dalam dokumen kebijakan daerah.

Dalam lanskap kajian kebijakan publik daerah, penelitian tentang kepemudaan dan keolahragaan masih dominan menempatkan isu ini dalam perspektif administratif dan implementatif. Penelitian ini menempatkan kebijakan kepemudaan dan keolahragaan sebagai produk dari proses politik lokal yang kompleks, dengan menyoroti peran relasi kekuasaan, konfigurasi aktor, serta dinamika jaringan kebijakan dalam menentukan arah kebijakan daerah. Dengan mengintegrasikan perspektif sistem politik, multiple streams, policy networks, dan koalisi advokasi, penelitian ini memposisikan Kabupaten Maros sebagai arena empiris yang representatif untuk memahami bagaimana kebijakan sektoral yang dianggap non-prioritas diproduksi, dinegosiasikan, dan dimarginalisasi dalam politik pembangunan daerah.

Konteks penelitian ini penting tidak hanya untuk menjelaskan stagnasi kebijakan kepemudaan dan keolahragaan di Maros, tetapi juga untuk memberikan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana sektor-sektor sosial non-utama sering kali terpinggirkan dalam sistem politik daerah yang berorientasi pada kalkulasi elektoral dan prioritas pembangunan jangka pendek.

#### **D. Rumusan Masalah**

Dalam menghadapi dinamika pembangunan daerah, pemuda memiliki peran strategis sebagai agen perubahan yang dapat mendorong kemajuan sosial, ekonomi, dan politik. Kabupaten Maros

sebagai salah satu wilayah yang terus berkembang, memiliki tantangan tersendiri dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan. Meskipun pemerintah daerah telah berupaya untuk merancang kebijakan yang mendukung pemberdayaan pemuda, masih terdapat berbagai kendala dalam proses penyusunannya, baik dari aspek regulasi, koordinasi antar-stakeholder, hingga keterbatasan sumber daya yang tersedia.

Salah satu tantangan utama dalam formulasi kebijakan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Maros adalah kurangnya keterlibatan aktif pemuda dalam perumusan kebijakan. Partisipasi pemuda dalam proses politik dan pengambilan keputusan masih rendah, sehingga kebijakan yang dihasilkan sering kali belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka. Selain itu, koordinasi antara pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, lembaga pendidikan, dan sektor swasta masih belum optimal, yang menyebabkan implementasi kebijakan sering kali berjalan secara parsial tanpa dukungan yang kuat dari berbagai pihak terkait.

Selain faktor partisipasi, hambatan lain yang dihadapi dalam formulasi kebijakan ini adalah keterbatasan infrastruktur dan sarana pendukung bagi pengembangan kepemudaan dan olahraga. Masih banyak fasilitas olahraga yang kurang memadai, terutama di daerah

pedesaan, sehingga akses pemuda terhadap pengembangan bakat dan keterampilan olahraga menjadi terbatas. Hal ini berdampak pada rendahnya minat serta partisipasi pemuda dalam kegiatan olahraga yang seharusnya dapat menjadi wadah pembinaan karakter, kedisiplinan, dan kesehatan mereka.

Lebih lanjut, dalam konteks politik, dinamika kebijakan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Maros juga dipengaruhi oleh berbagai kepentingan dari aktor-aktor yang terlibat dalam penyusunannya. Kepentingan politik, birokrasi yang kompleks, serta keterbatasan anggaran sering kali menjadi faktor penghambat dalam menghasilkan kebijakan yang benar-benar efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan suatu model kebijakan yang lebih inklusif, berbasis data, dan mampu mengakomodasi berbagai tantangan serta kebutuhan pemuda di Kabupaten Maros.

Berdasarkan berbagai tantangan yang telah diuraikan tersebut, peneliti dapat merumuskan masalah penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana proses politik dalam formulasi Kebijakan Pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan di Kabupaten Maros?

2. Faktor-faktor apa yang menghambat formulasi Kebijakan Pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan di Kabupaten Maros?
3. Bagaimana model dalam formulasi Kebijakan Pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan di Kabupaten Maros?

#### **E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

##### 1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada masalah penelitian yang diungkapkan diatas, penelitian ini kemudian dilakukan bertujuan untuk:

- 1.1. Menjelaskan dan menganalisis proses politik formulasi kebijakan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan di kabupaten maros.
- 1.2. Menjelaskan dan menganalisis faktor-faktor apa yang menghambat proses politik formulasi Kebijakan Pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan Di Kabupaten Maros.
- 1.3. Menjelaskan dan rumuskan model formulasi Kebijakan Pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan Di Kabupaten Maros.

##### 2. Manfaat Penelitian

- 2.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian ilmu politik, kebijakan publik, dan administrasi pemerintahan lokal. Penelitian ini berfokus pada bagaimana proses politik di tingkat lokal memengaruhi pengambilan keputusan kebijakan publik. Dari sisi teori, penelitian ini memperkaya pemahaman tentang dinamika politik lokal, interaksi antaraktor politik, serta bagaimana kekuatan dan kepentingan politik memengaruhi hasil kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam kajian-kajian serupa terkait kebijakan kepemudaan dan keolahragaan di daerah lain.

Penelitian ini juga memberikan sumbangan bagi pengembangan teori terkait proses formulasi kebijakan, khususnya dalam konteks demokrasi lokal. Hasil penelitian ini bisa menjadi landasan bagi penelitian lebih lanjut mengenai hubungan antara kepentingan politik lokal dengan kualitas kebijakan yang dihasilkan, serta bagaimana peran partisipasi masyarakat dan pemuda dalam mempengaruhi proses kebijakan.

## 2.2. Manfaat Praktis

Dari sisi praktis, penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah daerah, pembuat kebijakan, serta organisasi

kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Maros. Dengan memahami proses politik yang terjadi dalam formulasi kebijakan, pemerintah daerah dan DPRD dapat mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam melibatkan lebih banyak aktor serta memastikan kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan pemuda dan masyarakat.

Penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi praktis mengenai strategi yang dapat dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan kepemudaan dan keolahragaan yang lebih baik. Temuan penelitian ini akan membantu dalam merancang mekanisme partisipasi yang lebih efektif serta meminimalkan konflik kepentingan politik dalam proses kebijakan.

Bagi organisasi pemuda dan kelompok olahraga, penelitian ini membantu mereka memahami cara untuk lebih terlibat dalam proses politik, mempengaruhi kebijakan, dan memperjuangkan aspirasi mereka dalam pengembangan kebijakan di tingkat lokal.

## **F. Kerangka Teoritik**

### **1. Pendekatan Sistem Politik**

David Easton dikenal sebagai salah satu pemikir utama dalam studi politik modern dengan pendekatan sistem politiknya. Pemikiran ini dirujuk dalam tiga karyanya, yaitu *The Political System* (1953), *A Framework for Political Analysis* (1965), dan *A System Analysis of Political Life* (1965). Dalam *The Political System*, Easton mengajukan perlunya teori umum yang mampu menjelaskan sistem politik secara sistematis dan menyeluruh (Chilcote, 1981).

Easton mendefinisikan politik sebagai proses alokasi nilai dalam masyarakat secara otoritatif. Konsep ini menegaskan bahwa keputusan politik harus memiliki legitimasi dan dibuat oleh otoritas yang sah. Michael Saward (2003) menambahkan bahwa dalam perspektif Easton, hanya negara yang memiliki otoritas eksklusif dalam mekanisme pengambilan keputusan dan tindakan politik. Oleh karena itu, legitimasi negara menjadi krusial dalam memastikan stabilitas politik.

Ronald H. Chilcote menyatakan pemikiran Easton dapat dirujuk pada tiga tulisannya, yaitu *The Political System*, *A Framework for Political Analysis*, dan *A System Analysis of Political Life*. Di dalam buku pertama (*The Political System*) yang terbit tahun 1953, Easton mengajukan argumentasi seputar

perlunya membangun satu teori umum yang mampu menjelaskan sistem politik secara lengkap. Teori tersebut harus mampu mensistematisasikan fakta-fakta kegiatan politik yang tercerai-berai ke dalam suatu penjelasan yang runtut dan tertata rapi.

Sistem politik Easton langsung berhubungan dengan negara. Atas definisi Easton ini, Michael Saward menyatakan adanya konsekuensi logis berikut:

- a. Bagi Easton hanya ada satu otoritas, yaitu otoritas negara.
- b. Peran dalam mekanisme *output* (keputusan dan tindakan) bersifat eksklusif, yaitu hanya di tangan lembaga yang memiliki otoritas.
- c. Easton menekankan pada keputusan yang mengikat dari pemerintah, dan sebab itu: a) Keputusan selalu dibuat oleh pemerintah yang legitimasinya bersumber dari konstitusi. b) Legitimasi keputusan oleh konstitusi dimaksudkan untuk menghindari chaos politik.
- d. Bagi Easton sangat penting bagi negara untuk selalu beroperasi secara legitimate.

Easton mengidentifikasi empat atribut yang perlu diperhatikan dalam setiap kajian sistem politik, yaitu:

- a. Unit-unit dan batasan-batasan suatu sistem politik Serupa dengan paradigma fungsionalisme, dalam kerangka kerja

sistem politik pun terdapat unit-unit yang satu sama lain saling berkaitan dan bekerja sama untuk menggerakkan roda kerja sistem politik. Unit-unit ini adalah lembaga-lembaga yang bersifat otoritatif untuk menjalankan sistem politik, seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, lembaga masyarakat sipil, dan sejenisnya. Unit-unit ini bekerja di dalam batasan sistem politik.

*b. Input-output*

*Input* merupakan masukan dari masyarakat pada sistem politik. *Input* masyarakat ke dalam sistem politik dapat berupa tuntutan dan dukungan. Tuntutan secara sederhana dapat disebut seperangkat kepentingan yang alokasinya belum merata atas sejumlah unit masyarakat dalam sistem politik. Dukungan secara sederhana adalah upaya masyarakat untuk mendukung keberadaan sistem politik agar terus berjalan. *Output* adalah hasil kerja sistem politik yang berasal baik dari tuntutan maupun dukungan masyarakat. *Output* terbagi dua, yaitu keputusan dan tindakan yang biasanya dilakukan oleh pemerintah. Keputusan adalah pemilihan satu atau beberapa tindakan sesuai tuntutan atau dukungan yang masuk. Sementara itu, tindakan adalah implementasi konkret pemerintah atas keputusan yang dibuat.

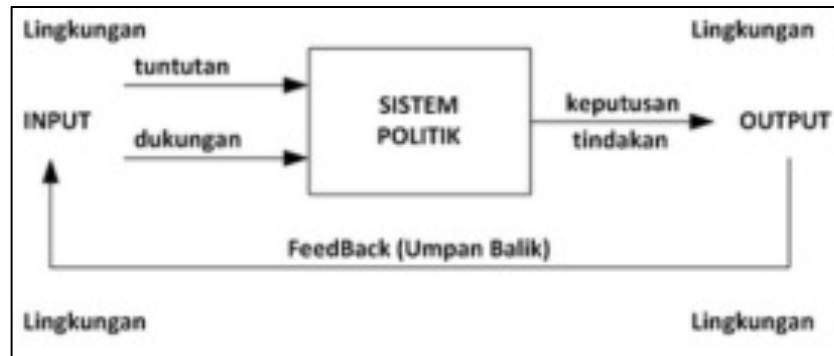
c. Diferensiasi dalam system

Sistem yang baik harus memiliki diferensiasi (pembedaan dan pemisahan) kerja. Di dalam masyarakat modern yang rumit tidak mungkin satu lembaga dapat menyelesaikan seluruh masalah. Misalnya, proses penyusunan Undang-Undang Pemilu tidak bisa hanya mengandalkan DPR sebagai penyusun utama, melainkan harus melibatkan Komisi Pemilihan Umum, lembaga-lembaga pemantau kegiatan pemilu, kepresidenan, ataupun kepentingan partai politik serta lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Dengan demikian, dalam konteks Undang-Undang Pemilu ini terdapat sejumlah struktur (aktor) yang memiliki fungsi sendiri-sendiri.

d. Integrasi dalam sistem

Integrasi adalah keterpaduan kerja antarunit yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama. Undang-Undang Pemilihan Umum tidak akan diputuskan serta ditindaklanjuti jika tidak ada kerja sama antarunit terkait.

**Gambar 1. 1. Skema Kerja Sistem Politik Easton**



Sumber : Basri, Seta., 2012

Dalam Gambar 1.1. Easton memisahkan sistem politik dengan masyarakat secara keseluruhan. Bagi Easton, sistem politik adalah suatu sistem yang berupaya mengalokasikan nilai-nilai di tengah masyarakat secara otoritatif. Alokasi nilai hanya dilakukan oleh lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan yang legitimate (otoritatif) di mata warga negara dan konstitusi. Suatu sistem politik bekerja untuk menghasilkan suatu keputusan (decision) dan tindakan (action) yang disebut kebijakan (policy) guna mengalokasikan nilai.

Unit-unit dalam sistem politik menurut Easton adalah tindakan politik (*political actions*), yaitu pembuatan UU, pengawasan DPR terhadap Presiden, tuntutan elemen masyarakat terhadap pemerintah, dan sejenisnya. Dalam awal kerjanya, sistem politik memperoleh masukan dari unit input.

Input adalah pemberi makan sistem politik. Input terdiri atas dua jenis: tuntutan dan dukungan. Tuntutan dapat muncul baik dalam sistem politik maupun dari lingkungan intrasocietal dan extrasocietal. Tuntutan ini dapat berkenaan dengan barang dan pelayanan (misalnya upah, hukum, ketenagakerjaan, jalan, dan sembako).

Tuntutan yang sudah terstimulasi kemudian menjadi garapan aktor-aktor di dalam sistem politik yang bersiap untuk menentukan masalah yang penting untuk didiskusikan melalui saluran-saluran di dalam sistem politik. Di sisi lain, dukungan (support) merupakan tindakan atau orientasi untuk melestarikan ataupun menolak sistem politik. Jadi, secara sederhana dapat disebutkan bahwa dukungan memiliki dua corak, yaitu positif (*forwarding*) dan negatif (*rejecting*) terhadap kinerja sebuah sistem politik.

Setelah tuntutan dan dukungan diproses di dalam sistem politik, keluarannya disebut sebagai output, yang menurut Easton berkisar pada dua entitas, yaitu keputusan (*decision*) dan tindakan (*action*). Output ini pada kondisi lebih lanjut akan memunculkan umpan balik (*feedback*) baik dari kalangan dalam sistem politik maupun lingkungan. Reaksi ini akan diterjemahkan kembali ke dalam format tuntutan dan dukungan, dan secara lebih lanjut meneruskan kinerja

sistem politik. Demikian proses kerja ini berlangsung dalam pola siklis.

## 2. Pendekatan *Rational Choice*

Pendekatan *Rational Choice* atau Teori Pilihan Rasional merupakan salah satu teori yang banyak digunakan dalam ilmu sosial, terutama dalam ekonomi, ilmu politik, dan sosiologi. Teori ini berasumsi bahwa individu bertindak secara rasional dalam mengambil keputusan, dengan tujuan untuk memaksimalkan kepentingan atau keuntungan pribadi mereka. Keputusan yang diambil berdasarkan analisis rasional terhadap biaya dan manfaat yang akan diperoleh dari suatu tindakan tertentu (Scott, 2000:126-138). Dalam teori ini, individu diasumsikan memiliki preferensi yang terstruktur dengan baik dan bertindak sesuai dengan kalkulasi yang logis untuk mencapai hasil yang paling menguntungkan bagi diri mereka sendiri (Elster, 1989:99-117).

Dalam ilmu politik, pendekatan *Rational Choice* sering digunakan untuk menjelaskan perilaku pemilih, politisi, dan pembentukan kebijakan. Pemilih, misalnya, diasumsikan akan memilih kandidat atau partai politik yang menurut mereka dapat memberikan manfaat terbesar bagi kepentingan pribadi atau kelompoknya. Begitu juga dengan politisi, yang dalam banyak kasus, mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan rasional untuk mempertahankan atau meningkatkan elektabilitas

mereka (Downs, 1957:78-103). Model ini juga dapat diterapkan dalam studi mengenai pembentukan koalisi politik, di mana partai-partai politik akan membentuk aliansi berdasarkan kalkulasi strategis tentang keuntungan elektoral yang dapat diperoleh dari kerja sama tersebut (Riker, 1962:13-27).

Selain dalam ilmu politik, pendekatan *Rational Choice* juga sering diterapkan dalam analisis kebijakan publik. Para pembuat kebijakan diasumsikan sebagai aktor rasional yang membuat keputusan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas kebijakan. Mereka mempertimbangkan berbagai opsi kebijakan yang tersedia dan memilih kebijakan yang memberikan hasil optimal dengan biaya paling rendah (Ostrom, 1990:199-137). Teori ini juga digunakan dalam analisis kebijakan kriminalitas, di mana individu dianggap melakukan tindakan kejahatan setelah mempertimbangkan keuntungan dan risiko yang mungkin mereka hadapi. Jika hukuman yang diterapkan lebih berat daripada keuntungan yang diperoleh dari tindakan kriminal, maka individu akan cenderung menghindari tindakan tersebut (Becker, 1968:169-217).

Meskipun menawarkan pendekatan analitis yang sistematis, teori *Rational Choice* tidak terlepas dari kritik. Salah satu kritik utama adalah asumsi bahwa individu selalu bertindak secara rasional dan berdasarkan kepentingan pribadi. Dalam

banyak kasus, keputusan manusia sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor emosional, nilai sosial, dan norma budaya yang tidak dapat dijelaskan secara sederhana melalui kalkulasi rasional (Green & Shapiro, 1994:178-205). Selain itu, dalam konteks kebijakan publik dan politik, tidak semua aktor memiliki informasi yang sempurna atau memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang sepenuhnya rasional. Hal ini menyebabkan keputusan yang diambil sering kali bersifat sub-optimal dan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti tekanan politik dan pengaruh kelompok kepentingan (Simon, 1957:78-123).

Terlepas dari kritik yang ada, pendekatan *Rational Choice* tetap menjadi salah satu teori yang paling berpengaruh dalam ilmu sosial. Dengan asumsi dasar bahwa individu bertindak secara rasional untuk memaksimalkan keuntungan mereka, teori ini memberikan kerangka kerja yang kuat untuk menganalisis perilaku manusia dalam berbagai konteks, mulai dari politik, ekonomi, hingga kebijakan publik. Namun, agar lebih akurat dalam menjelaskan realitas sosial, pendekatan ini sering kali dikombinasikan dengan teori-teori lain yang lebih mempertimbangkan faktor sosial dan psikologis dalam pengambilan keputusan (Hindmoor & Taylor, 2015:150-175).

### 3. Penggunaan Teori

#### a. Konsep tentang Proses Politik

Teori Proses Politik menjadi salah satu pendekatan utama dalam kajian kebijakan publik yang menekankan pentingnya interaksi antara aktor-aktor politik dalam proses formulasi dan implementasi kebijakan. Teori ini berakar pada pemahaman bahwa kebijakan publik tidak dapat dipisahkan dari proses politik yang kompleks dan dinamis, di mana berbagai kepentingan dan kekuatan saling mempengaruhi. Menurut Parsons (1995:115-129), proses politik dapat dipandang sebagai mekanisme melalui mana kekuasaan dan kepentingan dikelola dalam pembuatan keputusan publik. Ini mencakup tahapan dari formulasi, pengesahan, hingga implementasi kebijakan.

Salah satu teori yang mendukung pandangan ini adalah model Multiple Streams Framework yang dikembangkan oleh Kingdon (1984:67-93). Teori ini menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah hasil dari pertemuan tiga arus: masalah (*problem stream*), kebijakan (*policy stream*), dan politik (*politics stream*). Dalam konteks pengembangan kepemudaan dan keolahragaan, tiga arus ini sangat relevan. Arus masalah mencakup isu-isu kepemudaan, seperti rendahnya partisipasi dalam kegiatan

olahraga, sementara arus kebijakan mencakup alternatif kebijakan yang diusulkan oleh para ahli atau birokrat. Terakhir, arus politik menggambarkan dinamika politik lokal di Kabupaten Maros yang melibatkan pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, serta aktor politik lainnya.

Teori Advokasi Koalisi (*Advocacy Coalition Framework/ACF*) yang dikemukakan oleh Sabatier dan Jenkins-Smith (1993:21-47) juga memberikan perspektif penting dalam memahami proses kebijakan. ACF menekankan bahwa kebijakan publik dibentuk oleh koalisi aktor-aktor yang berbagi keyakinan dasar yang sama dan bekerja sama untuk mempengaruhi proses kebijakan. Dalam konteks pengembangan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Maros, koalisi ini mungkin terdiri dari pemerintah daerah, komunitas olahraga, organisasi kepemudaan, serta partai politik lokal. ACF juga mencermati bagaimana dinamika politik yang lebih luas, seperti perubahan pemerintahan atau krisis ekonomi, dapat mempengaruhi jalannya kebijakan.

Lebih lanjut, teori *Rational Choice* yang diusulkan oleh Downs (1957:78-103) dan Ostrom (1990:119-137) melihat proses politik sebagai hasil dari tindakan rasional individu-

individu yang berupaya memaksimalkan kepentingan mereka. Dalam pembuatan kebijakan publik, termasuk kebijakan kepemudaan dan keolahragaan, para aktor seperti birokrat, politisi, dan pemangku kepentingan lainnya dianggap bertindak sesuai dengan kalkulasi rasional untuk mencapai hasil yang paling menguntungkan. Namun, teori ini seringkali dikritik karena mengabaikan faktor-faktor non-ekonomi seperti norma sosial dan pengaruh budaya, yang juga berperan penting dalam proses kebijakan di daerah seperti Kabupaten Maros.

Model Tahapan Kebijakan (*Policy Cycle*) yang dikembangkan oleh Lasswell (1956:72-96) adalah salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam analisis kebijakan publik. Model ini membagi proses kebijakan menjadi beberapa tahap, yaitu perumusan masalah, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi, dan evaluasi. Dalam konteks pengembangan kepemudaan dan keolahragaan, tahapan ini dapat diaplikasikan dengan melibatkan pemerintah daerah dalam proses formulasi kebijakan berdasarkan kebutuhan dan aspirasi pemuda di Kabupaten Maros, serta melibatkan pemangku kepentingan dalam evaluasi program yang telah dilaksanakan.

Selain itu, teori Pluralisme yang diperkenalkan oleh Dahl (1961:131-152) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah hasil dari negosiasi dan kompromi antara berbagai kelompok kepentingan yang memiliki akses ke kekuasaan politik. Dalam hal ini, kebijakan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Maros dapat dipahami sebagai hasil dari interaksi antara pemerintah, kelompok olahraga, pemuda, dan masyarakat sipil yang masing-masing memiliki preferensi dan kepentingan berbeda.

Sebagai tambahan, Teori Jaringan Kebijakan (*Policy Networks*) yang dipelopori oleh Rhodes (1997:29-53) juga sangat relevan dalam memahami proses politik di tingkat lokal. Rhodes menggambarkan jaringan kebijakan sebagai struktur hubungan antara berbagai aktor, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil, yang berkolaborasi untuk menghasilkan kebijakan publik. Dalam kasus Maros, jaringan ini dapat melibatkan kerjasama antara pemerintah daerah dengan komunitas olahraga, organisasi kepemudaan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses formulasi kebijakan.

Penekanan pada partisipasi pemuda dalam proses kebijakan juga diangkat oleh Teori Partisipasi Demokratis (Pateman, 1970:37-56). Teori ini menyoroti pentingnya

partisipasi aktif warga negara, termasuk pemuda, dalam pengambilan keputusan politik. Kebijakan pengembangan kepemudaan di Kabupaten Maros idealnya melibatkan pemuda tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai aktor utama dalam proses politik lokal. Ini bisa diwujudkan melalui forum-forum dialog antara pemerintah dan komunitas kepemudaan, sehingga aspirasi mereka dapat terakomodasi secara lebih efektif.

Dengan memadukan berbagai teori ini, proses politik dalam formulasi kebijakan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Maros dapat dipahami sebagai sebuah mekanisme yang kompleks, di mana berbagai aktor dan kepentingan saling berinteraksi. Kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bergantung pada preferensi politisi atau birokrat, tetapi juga pada dinamika sosial dan politik yang lebih luas, serta interaksi antara pemerintah dan masyarakat sipil, khususnya pemuda.

#### 4. Teori Pluralisme dalam kebijakan publik

Teori pluralisme, yang diperkenalkan oleh Robert Dahl (1961:131-152), menekankan bahwa kebijakan publik adalah hasil dari negosiasi dan kompromi antara berbagai kelompok kepentingan yang berpartisipasi dalam proses politik. Menurut teori ini, tidak ada satu kelompok yang memiliki kekuasaan

absolut dalam pengambilan keputusan, melainkan kekuasaan didistribusikan di antara berbagai aktor yang bersaing untuk mempengaruhi kebijakan. Dalam konteks ini, pemerintah berperan sebagai penengah yang mendengarkan berbagai kepentingan dan membuat keputusan berdasarkan konsensus yang paling mungkin diterima oleh berbagai pihak.

Dalam pluralisme, partisipasi dari kelompok-kelompok masyarakat sipil seperti organisasi kepemudaan, komunitas olahraga, dan sektor swasta menjadi penting karena mereka dianggap memiliki akses yang sama ke arena politik. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa proses kebijakan adalah arena kompetitif di mana setiap kelompok dapat mencoba mempengaruhi hasil sesuai dengan kepentingan mereka. Teori ini relevan dalam pengembangan kebijakan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Maros, di mana berbagai aktor seperti pemerintah daerah, kelompok pemuda, dan komunitas olahraga terlibat dalam pembahasan dan perumusan kebijakan.

Teori pluralisme dalam politik menyatakan bahwa kekuasaan dan pengambilan keputusan tidak terpusat pada satu kelompok atau aktor, melainkan didistribusikan di antara berbagai kelompok kepentingan yang saling bersaing dalam proses politik. Pluralisme, yang diperkenalkan oleh Robert

Dahl (1961:131-152), berfokus pada peran penting kelompok-kelompok masyarakat, seperti organisasi non-pemerintah, komunitas lokal, asosiasi kepemudaan, dan komunitas olahraga, dalam mempengaruhi kebijakan publik. Dalam konteks Kabupaten Maros, teori pluralisme dapat membantu kita memahami bagaimana kebijakan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan dirumuskan melalui interaksi berbagai aktor politik dan non-politik.

Di Kabupaten Maros, pluralisme terlihat dari beragamnya kelompok yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan di sektor kepemudaan dan keolahragaan. Kelompok-kelompok ini terdiri dari pemerintah daerah, partai politik, organisasi kepemudaan, komunitas olahraga, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Masing-masing kelompok ini membawa aspirasi, kepentingan, dan perspektif yang berbeda dalam proses kebijakan. Pemerintah daerah mungkin berfokus pada pencapaian tujuan pembangunan daerah, sementara organisasi kepemudaan mengadvokasi perbaikan fasilitas dan peningkatan akses bagi pemuda untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga. Di sisi lain, komunitas olahraga mungkin menginginkan kebijakan yang mendukung pembinaan atlet lokal dan pengembangan infrastruktur olahraga.

Dalam proses pluralisme ini, kebijakan yang dihasilkan merupakan hasil kompromi antara berbagai kelompok kepentingan. Pemerintah daerah, sebagai penengah, mendengarkan aspirasi dan tuntutan dari berbagai pihak, mengelola interaksi politik yang muncul, dan akhirnya merumuskan kebijakan yang mencerminkan keseimbangan antara berbagai kepentingan tersebut. Misalnya, dalam pengembangan kebijakan olahraga, pemerintah mungkin perlu menyeimbangkan tuntutan untuk membangun fasilitas olahraga baru dengan kebutuhan anggaran yang terbatas. Mereka juga harus mempertimbangkan pandangan masyarakat luas, yang mungkin ingin melihat kebijakan yang berkelanjutan dan inklusif, serta pandangan aktor politik yang memiliki agenda khusus terkait kepemudaan.

Teori pluralisme juga menggarisbawahi pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses politik. Dalam pengembangan kebijakan kepemudaan dan keolahragaan di Maros, kelompok-kelompok masyarakat sipil dan pemuda berpartisipasi aktif melalui forum diskusi publik, konsultasi kebijakan, atau keterlibatan langsung dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini memberi kesempatan bagi suara-suara yang berbeda untuk didengar, memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan mencerminkan

kebutuhan masyarakat. Contohnya, dalam formulasi kebijakan olahraga, masukan dari komunitas olahraga lokal dapat membantu pemerintah daerah merumuskan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan atlet muda, serta memastikan pengelolaan fasilitas olahraga yang adil dan merata.

Namun, teori pluralisme juga menghadapi tantangan dalam penerapannya di daerah seperti Kabupaten Maros. Salah satu kritik terhadap pluralisme adalah bahwa tidak semua kelompok memiliki akses yang setara terhadap kekuasaan politik. Dalam beberapa kasus, kelompok-kelompok yang lebih kuat secara ekonomi atau politik, seperti sektor swasta atau elit politik, mungkin memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan kelompok-kelompok masyarakat yang lebih lemah, seperti organisasi pemuda. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan mungkin lebih mencerminkan kepentingan kelompok-kelompok yang dominan, sementara kelompok-kelompok yang lebih lemah kurang terwakili dalam proses tersebut.

Secara keseluruhan, penerapan teori pluralisme dalam formulasi kebijakan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Maros menunjukkan pentingnya peran interaksi dan negosiasi antara berbagai kelompok

kepentingan dalam proses politik. Kebijakan yang dihasilkan melalui pendekatan pluralis cenderung lebih inklusif dan mencerminkan berbagai kepentingan, meskipun tantangan seperti ketimpangan akses terhadap kekuasaan tetap ada. Dengan melibatkan lebih banyak kelompok pemuda dan komunitas olahraga dalam proses kebijakan, Kabupaten Maros dapat mencapai kebijakan yang lebih partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

#### 5. Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*)

Teori Pilihan Rasional, yang dipopulerkan oleh Anthony Downs (1957:78-103) dan dikembangkan lebih lanjut oleh Elinor Ostrom (1990:119-137), melihat aktor dalam proses kebijakan sebagai individu yang bertindak secara rasional untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Setiap aktor, baik itu politisi, birokrat, atau kelompok kepentingan, diasumsikan memiliki preferensi tertentu yang mereka coba realisasikan melalui keputusan kebijakan. Mereka akan memilih strategi yang paling efektif untuk mencapai tujuan tersebut, dengan mempertimbangkan kendala yang ada seperti biaya dan keuntungan politik.

Dalam proses pembuatan kebijakan kepemudaan dan keolahragaan, teori ini membantu menjelaskan mengapa aktor-aktor tertentu lebih condong untuk mendukung atau

menolak suatu kebijakan. Misalnya, seorang politisi mungkin mendukung kebijakan pengembangan olahraga karena hal itu dapat meningkatkan popularitasnya di kalangan pemilih muda. Namun, teori ini seringkali dikritik karena mengabaikan faktor-faktor non-ekonomi seperti norma sosial, nilai, dan tradisi lokal yang juga dapat mempengaruhi keputusan kebijakan.

Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*) merupakan salah satu pendekatan utama dalam ilmu politik dan ekonomi yang berfokus pada bagaimana individu atau aktor politik membuat keputusan berdasarkan kalkulasi rasional untuk memaksimalkan keuntungan atau kepentingan mereka. Teori ini berasumsi bahwa setiap aktor yang terlibat dalam proses politik akan memilih tindakan yang memberikan manfaat terbesar bagi dirinya, dengan mempertimbangkan semua sumber daya yang dimilikinya serta konsekuensi dari pilihan yang dibuat. Teori ini pertama kali dipopulerkan oleh Anthony Downs dalam bukunya *An Economic Theory of Democracy* (1957:78-103) dan dikembangkan lebih lanjut oleh Elinor Ostrom (1990:119-137) dalam konteks pengelolaan sumber daya bersama.

Dalam konteks formulasi kebijakan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Maros, teori

Pilihan Rasional dapat membantu menjelaskan bagaimana aktor-aktor politik, seperti politisi, birokrat, dan pemangku kepentingan lainnya, bertindak dalam proses pembuatan kebijakan. Menurut teori ini, setiap aktor memiliki tujuan yang ingin dicapai dan akan membuat keputusan berdasarkan evaluasi rasional atas berbagai alternatif yang ada. Tujuan tersebut dapat berupa keuntungan politik, seperti dukungan elektoral dari pemuda dan komunitas olahraga, atau manfaat ekonomi, seperti pengelolaan anggaran yang efisien untuk pembangunan infrastruktur olahraga.

Sebagai contoh, dalam menyusun kebijakan untuk membangun fasilitas olahraga baru di Kabupaten Maros, politisi mungkin mempertimbangkan bagaimana keputusan tersebut akan mempengaruhi citra politik mereka di mata pemilih muda. Jika pembangunan fasilitas olahraga dipandang sebagai langkah yang populer dan dapat meningkatkan dukungan politik, maka politisi cenderung mendukung kebijakan tersebut. Sebaliknya, jika biaya yang dikeluarkan terlalu besar atau tidak sesuai dengan preferensi pemilih, politisi mungkin akan memilih opsi lain yang lebih menguntungkan secara elektoral. Begitu pula, birokrat yang terlibat dalam perumusan kebijakan mungkin memilih opsi yang paling efisien dari segi anggaran dan sumber daya,

sambil memastikan bahwa tujuan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan tetap tercapai.

Dalam penerapan teori ini, penting untuk memahami bahwa aktor-aktor dalam proses kebijakan tidak hanya bertindak berdasarkan keuntungan langsung, tetapi juga mempertimbangkan implikasi jangka panjang dari keputusan yang diambil. Misalnya, kebijakan yang mendukung peningkatan akses pemuda terhadap kegiatan olahraga dapat dilihat sebagai investasi jangka panjang dalam kesehatan masyarakat dan prestasi olahraga lokal. Oleh karena itu, meskipun mungkin ada biaya awal yang signifikan, aktor-aktor rasional akan memilih kebijakan tersebut jika mereka percaya bahwa keuntungan jangka panjang, seperti peningkatan prestasi olahraga atau pengurangan masalah kesehatan, lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan.

Namun, salah satu kritik terhadap teori Pilihan Rasional adalah asumsi bahwa aktor-aktor selalu bertindak secara rasional dan memiliki informasi yang cukup untuk membuat keputusan terbaik. Dalam kenyataannya, proses politik sering kali penuh dengan ketidakpastian, di mana informasi yang tidak lengkap atau bahkan salah bisa mempengaruhi pengambilan keputusan. Dalam konteks Kabupaten Maros, misalnya, politisi atau birokrat mungkin

tidak selalu memiliki data yang lengkap tentang kebutuhan sebenarnya dari pemuda terkait fasilitas olahraga, sehingga mereka membuat keputusan berdasarkan asumsi atau informasi yang terbatas. Hal ini dapat menyebabkan kebijakan yang kurang efektif atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, teori Pilihan Rasional cenderung mengabaikan faktor-faktor non-ekonomi, seperti nilai-nilai budaya, norma sosial, atau komitmen moral, yang juga mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Dalam konteks pengembangan kepemudaan dan keolahragaan, faktor-faktor ini bisa sangat relevan, terutama ketika masyarakat atau komunitas lokal memiliki nilai-nilai tertentu yang harus diperhitungkan dalam kebijakan. Misalnya, komitmen terhadap pengembangan kepemudaan mungkin tidak selalu dilihat sebagai keuntungan material bagi aktor politik, tetapi lebih sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang penting dalam mempertahankan legitimasi politik dan kepercayaan publik.

Secara keseluruhan, teori Pilihan Rasional memberikan kerangka yang berguna untuk menganalisis bagaimana aktor-aktor politik di Kabupaten Maros membuat keputusan dalam formulasi kebijakan pengembangan

kepemudaan dan keolahragaan. Dengan memahami bahwa setiap keputusan didasarkan pada perhitungan untung-rugi yang rasional, kita dapat lebih memahami motivasi di balik tindakan politisi, birokrat, dan kelompok kepentingan lainnya dalam proses kebijakan. Namun, penting untuk diingat bahwa pilihan rasional tidak selalu mencakup semua dimensi dari pengambilan keputusan politik, terutama yang berkaitan dengan aspek-aspek sosial dan budaya yang lebih kompleks.

#### 6. Model *Multiple Streams*

John Kingdon (1984:67-93) mengembangkan *Multiple Streams Framework* yang berfokus pada peran aktor dalam memanfaatkan "jendela peluang" untuk mempengaruhi kebijakan. Teori ini menekankan bahwa proses kebijakan tidak selalu berjalan secara linear dan terstruktur, tetapi dipengaruhi oleh interaksi antara tiga arus utama: masalah (*problem stream*), kebijakan (*policy stream*), dan politik (*politics stream*). Ketika ketiga arus ini bertemu pada satu titik, sebuah jendela peluang terbuka bagi aktor politik untuk memperkenalkan atau mengubah kebijakan.

Dalam konteks pengembangan kebijakan kepemudaan dan keolahragaan, jendela peluang mungkin terbuka ketika ada masalah sosial yang jelas terkait dengan pemuda, seperti rendahnya partisipasi dalam kegiatan olahraga atau tingginya

tingkat pengangguran di kalangan pemuda. Pada saat yang sama, para ahli dan birokrat mungkin sudah mengembangkan usulan kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut, dan jika dinamika politik memungkinkan, kebijakan tersebut dapat diadopsi oleh pemerintah daerah.

Model *Multiple Streams* adalah salah satu teori dalam studi kebijakan publik yang dikembangkan oleh John W. Kingdon dalam bukunya *Agendas, Alternatives, and Public Policies* (1984:67-93). Teori ini memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana isu-isu kebijakan muncul dan diadopsi oleh para pembuat keputusan. Menurut Kingdon, kebijakan publik merupakan hasil dari interaksi antara tiga arus utama (*streams*), yaitu *problem stream* (arus masalah), *policy stream* (arus kebijakan), dan *politics stream* (arus politik). Ketiga arus ini biasanya berjalan secara independen, tetapi pada momen tertentu mereka dapat bertemu dan menciptakan "jendela peluang" (*policy window*) untuk terjadinya perubahan kebijakan.

Dalam konteks formulasi kebijakan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Maros, Model *Multiple Streams* dapat memberikan wawasan tentang bagaimana isu-isu terkait kepemudaan dan olahraga bisa naik ke agenda kebijakan pemerintah daerah dan kemudian

diadopsi menjadi kebijakan publik. Berikut adalah penjelasan dari setiap arus dalam model ini:

a) *Problem Stream* (Arus Masalah)

Arus masalah berfokus pada isu-isu atau masalah yang muncul di masyarakat dan memerlukan perhatian dari pembuat kebijakan. Dalam pengembangan kepemudaan dan keolahragaan, masalah yang mungkin diidentifikasi di Kabupaten Maros bisa berupa rendahnya partisipasi pemuda dalam kegiatan olahraga, kurangnya fasilitas olahraga yang memadai, atau tingginya tingkat pengangguran di kalangan pemuda. Masalah ini bisa muncul melalui data statistik, keluhan dari masyarakat, atau laporan media.

Untuk suatu masalah dapat diakui sebagai masalah kebijakan, perlu adanya pengakuan publik dan kesadaran di antara para pemangku kepentingan bahwa masalah tersebut penting dan mendesak untuk diselesaikan. Di Kabupaten Maros, jika komunitas pemuda dan olahraga terus mendorong agar pemerintah daerah memperhatikan kebutuhan fasilitas dan program kepemudaan, maka isu ini dapat naik ke permukaan dan menjadi prioritas dalam agenda kebijakan publik.

b) *Policy Stream* (Arus Kebijakan)

Arus kebijakan terdiri dari berbagai solusi atau alternatif kebijakan yang diusulkan oleh para ahli, akademisi, birokrat, dan pemangku kepentingan lainnya. Solusi-solusi ini diuji dalam komunitas kebijakan dan melalui proses evaluasi, seleksi, dan modifikasi, solusi yang layak akan muncul dan siap diadopsi oleh pembuat kebijakan.

Dalam konteks Kabupaten Maros, arus kebijakan mungkin mencakup berbagai usulan dari organisasi kepemudaan, komunitas olahraga, akademisi, atau pihak lain yang terkait. Misalnya, usulan untuk membangun pusat olahraga terpadu bagi pemuda atau program pelatihan olahraga yang berfokus pada peningkatan prestasi atlet muda. Arus kebijakan ini diisi oleh berbagai gagasan dan alternatif yang siap diimplementasikan apabila kesempatan politik muncul.

c) *Politics Stream* (Arus Politik)

Arus politik berhubungan dengan dinamika politik, termasuk suasana politik, keseimbangan kekuatan antara partai politik, kepentingan pemilih, dan pergantian aktor politik. Faktor-faktor ini sangat menentukan kapan kebijakan tertentu dapat diadopsi. Di Kabupaten Maros, arus politik dipengaruhi oleh pemilihan kepala daerah,

hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD, serta dukungan dari partai politik terhadap program-program tertentu.

Misalnya, jika pemilihan bupati semakin dekat, kebijakan yang menysasar pemuda dan olahraga dapat menjadi isu yang menarik bagi politisi karena pemuda merupakan kelompok pemilih yang potensial. Pemerintah daerah mungkin melihat kebijakan pengembangan olahraga sebagai cara untuk meningkatkan popularitas dan dukungan politik.

d) *Policy Window* (Jendela Peluang)

Menurut Kingdon, kebijakan baru atau perubahan kebijakan terjadi ketika ketiga arus ini bertemu, menciptakan "jendela peluang". Ini adalah momen di mana masalah yang mendesak bertemu dengan solusi yang layak dan situasi politik yang mendukung, sehingga memungkinkan terjadinya perubahan kebijakan. Di Kabupaten Maros, misalnya, jendela peluang bisa terbuka jika pemerintah daerah menerima tekanan publik yang signifikan untuk meningkatkan fasilitas olahraga bagi pemuda, sementara pada saat yang sama, politisi melihat ini sebagai peluang untuk meningkatkan dukungan di kalangan pemuda. Jika ada usulan kebijakan yang sudah

siap dan lingkungan politik mendukung, kebijakan baru terkait pengembangan kepemudaan dan keolahragaan bisa diadopsi.

Sebagai contoh, jika terjadi peningkatan masalah kesehatan di kalangan pemuda karena kurangnya aktivitas fisik, bersamaan dengan usulan dari komunitas olahraga untuk memperluas fasilitas olahraga, dan politisi melihat peluang ini untuk meningkatkan citra mereka, jendela peluang mungkin terbuka untuk mengadopsi kebijakan tersebut. Kebijakan seperti pembangunan pusat olahraga atau program pengembangan atlet muda bisa segera diadopsi dalam situasi ini.

e) Aplikasi Model *Multiple Streams*

Model *Multiple Streams* membantu menjelaskan bagaimana kebijakan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Maros dapat dipengaruhi oleh interaksi dari ketiga arus tersebut. Arus masalah seperti kurangnya fasilitas olahraga, arus kebijakan yang menawarkan solusi konkret, dan arus politik yang mendukung perubahan kebijakan semuanya harus bertemu pada waktu yang tepat agar kebijakan dapat diadopsi. Melalui pendekatan ini, pemerintah daerah Maros dapat lebih memahami dinamika kompleks yang

mempengaruhi proses kebijakan dan memaksimalkan jendela peluang untuk menghasilkan kebijakan yang efektif dan relevan bagi pemuda dan masyarakat olahraga.

#### 7. Teori Advokasi Koalisi (Advocacy Coalition Framework)

Teori Advokasi Koalisi, yang dikembangkan oleh Sabatier dan Jenkins-Smith (1993:21-47), menekankan bahwa proses kebijakan didorong oleh koalisi aktor-aktor yang berbagi keyakinan dasar yang sama. Dalam teori ini, kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh aktor politik atau birokrasi, tetapi oleh koalisi yang terdiri dari kelompok kepentingan, organisasi non-pemerintah, akademisi, dan media yang berusaha untuk mempengaruhi agenda kebijakan berdasarkan nilai-nilai bersama.

Koalisi advokasi bekerja dalam jangka waktu yang panjang dan seringkali mampu memengaruhi perubahan kebijakan secara bertahap. Misalnya, dalam pengembangan kebijakan kepemudaan dan keolahragaan di Maros, kelompok-kelompok yang peduli dengan peningkatan kesehatan pemuda dan prestasi olahraga mungkin bekerja sama untuk memajukan agenda mereka, baik melalui partisipasi langsung dalam proses kebijakan maupun melalui advokasi publik.

Teori Advokasi Koalisi atau *Advocacy Coalition Framework* (ACF) adalah salah satu pendekatan utama dalam analisis kebijakan yang dikembangkan oleh Paul Sabatier dan Hank Jenkins-Smith pada akhir 1980-an. Teori ini berfokus pada bagaimana kebijakan publik dibentuk dan berubah dalam konteks yang melibatkan banyak aktor, koalisi, serta jangka waktu yang panjang. Menurut ACF, kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh pemerintah atau lembaga formal saja, tetapi juga oleh interaksi antar koalisi advokasi yang terdiri dari berbagai kelompok yang memiliki pandangan, kepentingan, dan keyakinan yang sama terkait isu-isu kebijakan tertentu.

Dalam konteks formulasi kebijakan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Maros, teori Advokasi Koalisi dapat digunakan untuk memahami bagaimana berbagai kelompok kepentingan, seperti pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, komunitas olahraga, sektor swasta, dan masyarakat sipil, bekerja sama dalam memengaruhi arah kebijakan. Koalisi advokasi ini dibentuk berdasarkan kesamaan pandangan dan keyakinan mengenai bagaimana kebijakan terkait kepemudaan dan olahraga seharusnya dirumuskan dan diimplementasikan.

a) Koalisi Advokasi dalam Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan

ACF menekankan pentingnya adanya koalisi yang bekerja untuk mempengaruhi kebijakan berdasarkan keyakinan bersama. Dalam pengembangan kepemudaan dan keolahragaan di Maros, beberapa koalisi advokasi mungkin terbentuk dari kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan terhadap peningkatan prestasi olahraga pemuda, akses terhadap fasilitas olahraga, serta pengembangan potensi pemuda melalui kegiatan kepemudaan yang mendukung kesejahteraan mereka. Sebagai contoh, organisasi kepemudaan dan komunitas olahraga mungkin bersatu dalam satu koalisi advokasi untuk mendorong pemerintah daerah mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk pembangunan fasilitas olahraga di daerah tersebut.

Teori ini menyatakan bahwa koalisi advokasi bekerja dalam policy subsystem yang terdiri dari berbagai aktor yang berbagi keyakinan dasar (*core beliefs*) yang sama tentang bagaimana suatu masalah harus diselesaikan. Dalam konteks Maros, ini berarti bahwa koalisi yang terdiri dari organisasi pemuda, komunitas olahraga, dan pendukung kebijakan akan bekerja bersama-sama dalam memengaruhi kebijakan publik,

dengan tujuan bersama untuk meningkatkan akses dan kualitas fasilitas olahraga bagi pemuda.

b) Keyakinan Dasar dan Pembelajaran Kebijakan

ACF juga menekankan bahwa koalisi advokasi tidak hanya didorong oleh kepentingan material atau kekuasaan politik, tetapi oleh keyakinan dasar (*deep core beliefs*) yang stabil dan mendasar, serta keyakinan kebijakan (*policy core beliefs*) yang lebih fleksibel namun masih berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar tersebut. Dalam konteks pengembangan kepemudaan dan keolahragaan di Maros, keyakinan dasar ini mungkin mencakup pandangan bahwa pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan olahraga adalah kunci untuk meningkatkan kualitas hidup pemuda dan masyarakat secara keseluruhan.

ACF memperkenalkan konsep *policy learning* atau pembelajaran kebijakan, yang terjadi ketika koalisi advokasi menyesuaikan strategi mereka berdasarkan pengalaman masa lalu atau perubahan situasi eksternal. Sebagai contoh, jika pemerintah Kabupaten Maros pernah gagal dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan infrastruktur olahraga karena masalah anggaran atau kurangnya koordinasi, maka koalisi advokasi yang terlibat dalam pembentukan kebijakan ini dapat mempelajari kegagalan

tersebut dan mengubah pendekatan mereka dalam advokasi kebijakan di masa depan. Hal ini penting dalam konteks jangka panjang, karena perubahan kebijakan yang signifikan biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun dan melalui proses evaluasi yang terus-menerus.

c) Dinamika Eksternal dan Internal dalam ACF

Teori ACF juga mengakui bahwa perubahan kebijakan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang berada di luar kontrol koalisi advokasi. Faktor-faktor eksternal ini mencakup perubahan politik, ekonomi, atau sosial yang dapat mengubah keseimbangan kekuatan antar koalisi. Sebagai contoh, jika terjadi perubahan kepemimpinan di Kabupaten Maros, koalisi advokasi yang mendukung pengembangan kepemudaan mungkin harus menyesuaikan strategi mereka untuk memastikan bahwa kebijakan baru yang diusulkan tetap sejalan dengan perubahan prioritas politik.

Dalam ACF, persaingan antar koalisi juga sangat penting. Koalisi yang mendukung kebijakan tertentu mungkin harus bersaing dengan koalisi lain yang memiliki pandangan berbeda. Misalnya, sementara koalisi advokasi yang terdiri dari organisasi kepemudaan dan komunitas olahraga mungkin mendorong peningkatan anggaran untuk pengembangan fasilitas olahraga, koalisi advokasi lain yang

berfokus pada isu-isu pendidikan atau infrastruktur ekonomi mungkin mendorong prioritas anggaran yang berbeda. Persaingan ini mengarah pada negosiasi dan kompromi, di mana kebijakan yang dihasilkan sering kali merupakan hasil dari keseimbangan kekuatan antar koalisi yang ada.

d) Pembelajaran Kebijakan dan Jangka Panjang

Salah satu kekuatan utama ACF adalah kemampuannya untuk menganalisis proses kebijakan dalam jangka panjang. Kebijakan publik tidak selalu berubah dalam hitungan bulan atau tahun, melainkan sering kali membutuhkan waktu yang lebih lama karena adanya faktor-faktor politik, sosial, dan ekonomi yang terus berubah. Dalam pengembangan kepemudaan dan keolahragaan di Maros, pembelajaran kebijakan dapat terjadi melalui pengalaman sebelumnya, baik dari keberhasilan maupun kegagalan, sehingga koalisi advokasi dapat terus menyesuaikan strategi mereka untuk memaksimalkan peluang keberhasilan dalam jangka panjang.

Dengan demikian, teori Advokasi Koalisi menawarkan perspektif yang mendalam tentang bagaimana kebijakan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Maros dapat dibentuk melalui kerja sama antara berbagai aktor yang berbagi keyakinan dan kepentingan yang sama.

Koalisi ini tidak hanya berperan dalam mendorong adopsi kebijakan, tetapi juga dalam memastikan bahwa kebijakan tersebut terus berkembang dan disesuaikan dengan perubahan konteks politik, sosial, dan ekonomi

#### 8. Model Tahapan Kebijakan (*Policy Cycle*)

Model Tahapan Kebijakan, pertama kali diperkenalkan oleh Harold Lasswell (1956:78-105), mengurai proses kebijakan ke dalam beberapa tahapan: identifikasi masalah, formulasi kebijakan, pengambilan keputusan, implementasi, dan evaluasi. Model ini berfungsi sebagai kerangka kerja untuk memahami bagaimana kebijakan berkembang dari awal hingga akhir. Dalam setiap tahap, ada aktor-aktor yang terlibat dan memiliki peran tertentu, serta kendala politik yang harus diatasi.

Dalam pengembangan kebijakan kepemudaan dan keolahragaan di Maros, tahap pertama adalah identifikasi masalah yang dihadapi pemuda, seperti kurangnya akses ke fasilitas olahraga. Selanjutnya, kebijakan dirumuskan dengan melibatkan aktor-aktor kunci, seperti pemerintah daerah dan organisasi olahraga, hingga akhirnya diputuskan dan diimplementasikan. Evaluasi kebijakan menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut mencapai tujuannya.

Model Tahapan Kebijakan atau *Policy Cycle* adalah salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam analisis kebijakan

publik untuk memahami bagaimana kebijakan dirumuskan, diadopsi, diimplementasikan, dan dievaluasi. Model ini pertama kali diperkenalkan oleh Harold Lasswell pada tahun 1956 dan kemudian dikembangkan oleh beberapa ilmuwan kebijakan. Policy Cycle membagi proses kebijakan menjadi beberapa tahap yang sistematis, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi kebijakan yang telah diterapkan. Model ini memberikan kerangka kerja yang berguna dalam melihat bagaimana kebijakan publik berkembang melalui tahapan-tahapan yang berbeda dan bagaimana setiap tahap memengaruhi hasil kebijakan.

Dalam konteks formulasi kebijakan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Maros, Model Tahapan Kebijakan dapat membantu menjelaskan bagaimana proses politik dan administratif berlangsung secara bertahap untuk menghasilkan kebijakan yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Model ini juga berguna dalam melihat bagaimana berbagai aktor terlibat dalam setiap tahap kebijakan, serta bagaimana keputusan diambil dan diimplementasikan.

#### 1) Identifikasi Masalah (*Problem Identification*)

Tahap pertama dalam Model Tahapan Kebijakan adalah identifikasi masalah. Pada tahap ini, pemerintah atau pemangku kepentingan lainnya mengenali isu atau masalah yang perlu ditangani melalui kebijakan publik. Dalam konteks

pengembangan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Maros, identifikasi masalah mungkin melibatkan pemahaman tentang rendahnya partisipasi pemuda dalam kegiatan olahraga, kurangnya fasilitas olahraga yang memadai, atau kurangnya program pembinaan atlet muda. Masalah-masalah ini bisa muncul dari data statistik, keluhan dari masyarakat, atau tekanan dari organisasi kepemudaan dan komunitas olahraga.

Pada tahap ini, pemerintah daerah dan aktor lainnya seperti organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan komunitas olahraga harus secara aktif mengidentifikasi masalah-masalah utama yang mempengaruhi sektor kepemudaan dan keolahragaan. Dalam konteks Kabupaten Maros, forum diskusi publik atau konsultasi dengan masyarakat bisa digunakan untuk mengumpulkan informasi terkait kebutuhan dan harapan pemuda serta komunitas olahraga.

## 2) Perumusan Kebijakan (*Policy Formulation*)

Setelah masalah diidentifikasi, tahap berikutnya adalah perumusan kebijakan. Pada tahap ini, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya mengembangkan berbagai alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi. Perumusan kebijakan melibatkan proses konsultasi dengan para ahli, organisasi pemuda, komunitas olahraga, serta aktor lain yang relevan. Dalam tahap ini,

berbagai solusi dan alternatif kebijakan diajukan, seperti membangun fasilitas olahraga baru, menyelenggarakan program pembinaan atlet muda, atau meningkatkan anggaran untuk program olahraga.

Perumusan kebijakan harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk ketersediaan anggaran, keterlibatan pemuda, dan dampak kebijakan terhadap masyarakat secara luas. Pemerintah Kabupaten Maros, misalnya, harus mengevaluasi alternatif-alternatif kebijakan yang ada dengan mempertimbangkan biaya, manfaat, dan dampak jangka panjang dari setiap pilihan. Konsultasi dengan berbagai kelompok pemuda dan organisasi olahraga sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.

### 3) Pengambilan Keputusan (*Policy Decision Making*)

Tahap ketiga adalah pengambilan keputusan, di mana pemerintah memilih alternatif kebijakan terbaik berdasarkan informasi yang dikumpulkan pada tahap sebelumnya. Dalam konteks pengembangan kepemudaan dan keolahragaan di Maros, pengambilan keputusan mungkin melibatkan pemerintah daerah, DPRD, dan aktor politik lainnya yang berwenang untuk mengesahkan kebijakan tersebut. Pada

tahap ini, pertimbangan politik, ekonomi, dan sosial juga memengaruhi keputusan akhir yang diambil.

Dalam tahap pengambilan keputusan, faktor-faktor politik sering kali mempengaruhi hasil kebijakan. Dukungan dari berbagai pihak, seperti partai politik, kelompok kepentingan, atau tokoh masyarakat, dapat memengaruhi kebijakan yang dipilih. Misalnya, jika kebijakan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan di Maros dipandang sebagai kebijakan yang akan meningkatkan dukungan politik, maka keputusan untuk mendukung kebijakan tersebut mungkin lebih mudah dicapai.

#### 4) Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*)

Setelah kebijakan diambil, tahap berikutnya adalah implementasi kebijakan. Pada tahap ini, kebijakan yang telah diputuskan harus diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. Dalam konteks kebijakan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Maros, implementasi mungkin mencakup pembangunan fasilitas olahraga, pelaksanaan program pembinaan pemuda, atau alokasi anggaran untuk kegiatan olahraga. Implementasi kebijakan ini melibatkan berbagai aktor, termasuk dinas terkait, organisasi kepemudaan, komunitas olahraga, serta sektor swasta yang mungkin berpartisipasi dalam penyediaan fasilitas atau pendanaan.

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada koordinasi antara berbagai lembaga dan aktor yang terlibat. Dalam beberapa kasus, masalah seperti kurangnya dana, koordinasi yang buruk, atau resistensi dari kelompok masyarakat dapat menghambat pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah diambil dapat diimplementasikan secara efektif dan tepat waktu.

#### 5) Evaluasi Kebijakan (*Policy Evaluation*)

Tahap terakhir dalam Model Tahapan Kebijakan adalah evaluasi kebijakan. Pada tahap ini, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya menilai apakah kebijakan yang diimplementasikan telah mencapai tujuan yang diinginkan. Evaluasi kebijakan melibatkan pengukuran hasil kebijakan, analisis dampak, serta identifikasi masalah yang mungkin muncul selama implementasi. Dalam konteks pengembangan kepemudaan dan keolahragaan di Maros, evaluasi kebijakan mungkin mencakup penilaian terhadap seberapa banyak pemuda yang terlibat dalam program olahraga, dampak kebijakan terhadap prestasi olahraga lokal, serta efektivitas fasilitas yang telah dibangun.

Evaluasi kebijakan memungkinkan pemerintah daerah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan kebijakan yang

diadopsi, dan jika diperlukan, membuat perubahan atau perbaikan. Evaluasi juga memberikan umpan balik penting yang dapat digunakan untuk meningkatkan kebijakan di masa mendatang. Jika evaluasi menunjukkan bahwa program-program olahraga tidak memberikan hasil yang diharapkan, pemerintah Kabupaten Maros dapat memodifikasi kebijakan atau memperkenalkan pendekatan baru untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

#### 9. Teori Jaringan Kebijakan (*Policy Networks*)

Teori Jaringan Kebijakan yang dikembangkan oleh Rhodes (1997:29-53) menggambarkan kebijakan publik sebagai hasil dari interaksi antara berbagai aktor yang saling berhubungan dalam jaringan. Aktor-aktor ini bisa berasal dari pemerintah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, serta kelompok masyarakat sipil. Jaringan kebijakan dibentuk melalui interaksi dan negosiasi antara aktor-aktor ini, yang memiliki akses terhadap sumber daya yang berbeda-beda.

Dalam proses pembuatan kebijakan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan, jaringan kebijakan memungkinkan terjalinnya kerjasama antara pemerintah daerah dengan komunitas olahraga, kelompok pemuda, serta sektor swasta yang mungkin berkontribusi melalui penyediaan fasilitas atau dukungan finansial. Jaringan kebijakan juga membantu

menjaga kesinambungan kebijakan dengan melibatkan berbagai pihak secara berkesinambungan dalam setiap tahap kebijakan.

Teori Jaringan Kebijakan atau *Policy Networks* menekankan bahwa kebijakan publik tidak hanya dihasilkan oleh pemerintah, tetapi juga oleh interaksi antara berbagai aktor yang memiliki kepentingan dan peran dalam suatu isu kebijakan. Dalam jaringan kebijakan, aktor-aktor dari sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil bekerja sama dalam suatu struktur informal atau formal untuk mempengaruhi dan membentuk kebijakan (Rhodes, 1997:29-53). Jaringan ini melibatkan aktor yang memiliki akses terhadap sumber daya seperti informasi, keahlian teknis, atau pengaruh politik, dan mereka bekerja dalam kerangka yang dinamis untuk mencapai tujuan kebijakan yang diinginkan.

Dalam konteks formulasi kebijakan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Maros, teori Jaringan Kebijakan sangat relevan karena kebijakan ini memerlukan kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah daerah, sebagai pengambil keputusan utama, perlu berkolaborasi dengan organisasi kepemudaan, komunitas olahraga, sektor swasta, serta akademisi untuk merumuskan kebijakan yang efektif. Misalnya, pemerintah mungkin membutuhkan masukan dari organisasi kepemudaan mengenai prioritas kebutuhan pemuda, sementara komunitas olahraga

dapat memberikan informasi mengenai fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung pengembangan atlet muda di Maros.

Salah satu karakteristik utama dari jaringan kebijakan adalah adanya hubungan horizontal antaraktor yang setara, tidak hanya tergantung pada struktur hierarkis tradisional (Marsh & Rhodes, 1992:71-79). Ini berarti bahwa kekuasaan dalam jaringan tidak selalu terpusat pada satu aktor, seperti pemerintah, tetapi didistribusikan di antara berbagai pihak yang memiliki pengaruh dan kepentingan. Dalam jaringan kebijakan di Kabupaten Maros, misalnya, organisasi kepemudaan mungkin memiliki kekuatan pengaruh yang besar karena mereka lebih memahami tantangan yang dihadapi oleh pemuda. Pada saat yang sama, sektor swasta mungkin berkontribusi melalui pendanaan atau penyediaan fasilitas olahraga.

Selain itu, teori ini menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi dalam jaringan kebijakan. Kerja sama yang efektif antara aktor-aktor dalam jaringan memungkinkan mereka untuk berbagi sumber daya dan pengetahuan, yang dapat menghasilkan kebijakan yang lebih baik. Dalam konteks pengembangan kepemudaan dan keolahragaan, pemerintah Kabupaten Maros dapat bekerja sama dengan komunitas olahraga dan lembaga swasta untuk merancang program-program olahraga yang inklusif

dan berkelanjutan. Melalui jaringan ini, keputusan yang diambil bisa lebih responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan, daripada hanya didasarkan pada perspektif birokrasi pemerintah.

Namun, teori Jaringan Kebijakan juga menunjukkan bahwa konflik antaraktor sering terjadi karena perbedaan kepentingan atau prioritas. Di Maros, misalnya, pemerintah daerah mungkin lebih berfokus pada alokasi anggaran untuk proyek infrastruktur olahraga, sementara organisasi kepemudaan lebih mendorong program-program pemberdayaan pemuda yang berbasis komunitas. Konflik ini sering kali diatasi melalui negosiasi dan kompromi dalam jaringan, yang memungkinkan kebijakan untuk berkembang dan disesuaikan dengan berbagai kepentingan.

Jaringan kebijakan juga menghadapi tantangan dalam hal efektivitas tata kelola (*governance*). Menurut Rhodes (1997:29-53), tata kelola dalam jaringan kebijakan memerlukan koordinasi yang baik, kepercayaan antaraktor, serta mekanisme yang jelas untuk menyelesaikan konflik. Di Kabupaten Maros, mekanisme ini mungkin melibatkan pertemuan reguler antara pemangku kepentingan, pembentukan forum dialog antara pemerintah daerah dan komunitas olahraga, atau pembuatan kesepakatan kerjasama antara sektor publik dan swasta. Tanpa tata kelola yang baik, jaringan kebijakan bisa menjadi tidak efektif, dan kebijakan yang dihasilkan bisa gagal mencapai tujuannya.

Keberhasilan penerapan teori Jaringan Kebijakan dalam kebijakan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan di Maros akan sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah daerah dapat membangun dan memelihara jaringan yang inklusif dan kooperatif. Aktor-aktor dalam jaringan ini harus mampu beradaptasi dengan perubahan konteks sosial dan politik, serta mampu bekerja sama meskipun memiliki kepentingan yang berbeda. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan melalui jaringan kebijakan ini dapat lebih efektif, responsif, dan berkelanjutan.

a) Partisipasi Pemuda dalam Proses Politik Kebijakan

Partisipasi pemuda dalam proses politik kebijakan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan merupakan aspek penting dalam menciptakan kebijakan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan kelompok pemuda. Keterlibatan aktif pemuda memungkinkan mereka untuk berperan langsung dalam membentuk kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka, sekaligus memberikan kesempatan untuk memperkuat kemampuan politik dan sosial mereka. Beberapa teori yang relevan untuk memahami partisipasi pemuda dalam proses kebijakan mencakup teori partisipasi demokratis, teori partisipasi deliberatif, dan teori pembelajaran politik.

Teori Partisipasi Demokratis, sebagaimana diungkapkan oleh Carole Pateman (1970:37-56), menekankan pentingnya keterlibatan aktif warga negara dalam pengambilan keputusan politik. Menurut teori ini, partisipasi warga negara dalam proses kebijakan bukan hanya hak, tetapi juga bagian integral dari sistem demokrasi yang sehat. Dalam konteks Kabupaten Maros, partisipasi pemuda tidak hanya sekadar aspirasi yang disuarakan melalui forum-forum formal seperti musyawarah pembangunan daerah (Musrenbang), tetapi juga menjadi alat pendidikan politik. Melalui keterlibatan ini, pemuda dapat belajar tentang bagaimana proses kebijakan berjalan, bagaimana prioritas kebijakan ditetapkan, dan bagaimana negosiasi politik terjadi.

Lebih jauh lagi, Teori Partisipasi Deliberatif yang dikembangkan oleh Jurgen Habermas (1984:52-73) menyoroti pentingnya diskusi yang rasional dan inklusif dalam proses politik. Partisipasi deliberatif mendorong semua pemangku kepentingan, termasuk pemuda, untuk terlibat dalam debat publik dan menyampaikan pandangan mereka dengan cara yang argumentatif dan saling menghormati. Dalam konteks kebijakan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan di Maros, pendekatan deliberatif memungkinkan pemuda untuk mendiskusikan berbagai isu yang dihadapi, seperti minimnya

fasilitas olahraga atau kurangnya program pembinaan, dalam forum yang dihadiri oleh pemerintah, organisasi olahraga, dan masyarakat sipil. Melalui proses deliberasi ini, kebijakan yang dihasilkan diharapkan lebih mencerminkan kebutuhan nyata pemuda dan lebih berkelanjutan.

Sementara itu, Teori Pembelajaran Politik yang diperkenalkan oleh Easton (1965:25-47) menyatakan bahwa partisipasi politik tidak hanya memengaruhi proses kebijakan, tetapi juga memberikan pengalaman pendidikan politik bagi peserta. Pemuda yang terlibat dalam proses kebijakan akan mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang sistem politik, struktur pemerintahan, dan cara bekerja di lingkungan politik. Di Kabupaten Maros, keterlibatan pemuda dalam formulasi kebijakan pengembangan olahraga tidak hanya akan memperkaya proses kebijakan itu sendiri, tetapi juga memperkuat kapasitas politik pemuda dalam berpartisipasi lebih lanjut di masa depan. Ini juga berkontribusi pada pembentukan kesadaran politik yang lebih kuat, di mana pemuda mulai melihat diri mereka bukan hanya sebagai penerima kebijakan, tetapi juga sebagai pembuat kebijakan yang potensial.

Namun, partisipasi pemuda dalam proses kebijakan sering kali menghadapi tantangan, seperti yang diungkapkan oleh Teori Eksklusi Sosial (*Social Exclusion Theory*). Menurut Silver

(1994:531-578), eksklusi sosial terjadi ketika kelompok tertentu, termasuk pemuda, terpinggirkan dari akses terhadap sumber daya dan peluang politik. Dalam banyak kasus, pemuda sering kali dipandang kurang memiliki kekuatan politik atau kapasitas untuk memengaruhi keputusan kebijakan. Di Kabupaten Maros, meskipun pemuda memiliki potensi besar, akses mereka ke proses politik dan pengambilan keputusan bisa terbatas karena kurangnya kanal formal atau budaya politik yang belum sepenuhnya inklusif. Hal ini menekankan pentingnya upaya lebih lanjut dari pemerintah daerah untuk menyediakan platform yang lebih terstruktur bagi pemuda untuk terlibat dalam perencanaan kebijakan publik.

Partisipasi pemuda dalam proses politik kebijakan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Maros bukan hanya tentang keterlibatan fisik, tetapi juga mencakup proses pembelajaran, advokasi, dan transformasi sosial. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan deliberatif, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya relevan secara politik, tetapi juga memperkuat posisi pemuda sebagai aktor kunci dalam pembangunan daerah.

## 10. Penelitian Terdahulu

Dalam *review* hasil penelitian terdahulu ini dituangkan beberapa hasil penelitian yang diperoleh dari jurnal, baik Jurnal Nasional maupun Jurnal Internasional, Desertasi dan Thesis yang memuat penelitian mengenai hal yang sama dengan ragam wilayah dan perspektifnya. Tujuan dipaparkannya *review* hasil penelitian terdahulu ini untuk memperkaya perspektif teoretis penelitian ini dan sebagai pembanding dengan hasil penelitian sebelumnya:

- a) Rahmad Diyanto (2020) Evaluasi Kebijakan Pembinaan Prestasi Cabang Olahraga Squash di Provinsi Riau

Hasil Penelitian Disertasi ini mengevaluasi kebijakan pembinaan prestasi cabang olahraga squash di Provinsi Riau. Diyanto menemukan bahwa meskipun kebijakan telah diformulasikan dengan baik, pelaksanaannya mengalami berbagai kendala, seperti minimnya fasilitas yang tersedia dan sosialisasi yang tidak efektif. Selain itu, faktor kelemahan dalam manajemen dan kurangnya sinergi antara pemerintah dan organisasi squash memperburuk efektivitas kebijakan. Hasil akhir penelitian ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pembinaan olahraga, dibutuhkan perbaikan koordinasi dan penguatan infrastruktur.

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode evaluasi kebijakan. Wawancara mendalam dilakukan dengan para pejabat pemerintah, pelatih, dan atlet, di samping analisis dokumen kebijakan dan observasi lapangan.

Perbedaan dengan Penelitian penulis dengan Penelitian Diyanto lebih berfokus pada evaluasi implementasi kebijakan spesifik (Squash), sedangkan penelitian penulis akan mencakup seluruh proses politik dalam formulasi kebijakan, dengan perhatian khusus pada peran aktor-aktor politik di Kabupaten Maros dalam kebijakan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan secara umum. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti dinamika interaksi aktor politik, sementara Diyanto lebih pada evaluasi praktik kebijakan yang sudah berjalan.

b. Syamsuddin (2019) Analisis Kebijakan Pengembangan Kepemudaan di Kota Makassar

Kebijakan pengembangan kepemudaan di Kota Makassar, dengan fokus pada bagaimana kebijakan tersebut dibentuk melalui proses politik lokal. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan pengembangan kepemudaan di Makassar sangat dipengaruhi oleh aktor-aktor politik lokal, termasuk pemerintah daerah dan organisasi kepemudaan. Sinergi antara aktor-aktor ini sering kali terganggu oleh perbedaan kepentingan politik, yang mengakibatkan implementasi kebijakan menjadi

tidak optimal. Salah satu temuan utama adalah bahwa partisipasi pemuda dalam proses kebijakan masih sangat minim, dan sebagian besar kebijakan diformulasikan secara top-down tanpa melibatkan partisipasi aktif dari pemuda.

Metode Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para pejabat pemerintah, organisasi kepemudaan, serta akademisi yang terlibat dalam kebijakan. Studi ini juga menganalisis dokumen-dokumen kebijakan terkait pengembangan kepemudaan di Kota Makassar.

Perbedaan dengan Penelitian penulis dengan Penelitian Syamsuddin berfokus pada kebijakan pengembangan kepemudaan di Makassar, sedangkan penelitian Anda mencakup tidak hanya kepemudaan tetapi juga aspek keolahragaan di Kabupaten Maros. Penelitian Anda juga memberikan perhatian lebih besar pada dinamika politik yang mempengaruhi kebijakan, sementara penelitian Syamsuddin lebih menitikberatkan pada minimnya partisipasi pemuda dalam proses kebijakan

- c. Siti Nuraini (2018) Peran Partai Politik dalam Penyusunan Kebijakan Keolahragaan di Provinsi Jawa Barat

Hasil Penelitian Nuraini meneliti bagaimana partai politik berperan dalam pembentukan kebijakan keolahragaan di

Provinsi Jawa Barat. Disertasi ini menemukan bahwa partai politik memiliki pengaruh besar dalam menentukan alokasi anggaran dan prioritas kebijakan keolahragaan. Nuraini juga menemukan bahwa kebijakan olahraga sering kali digunakan sebagai alat politik oleh partai-partai untuk meningkatkan popularitas mereka di kalangan pemilih muda. Meskipun kebijakan keolahragaan telah diatur secara nasional, implementasi di tingkat provinsi sangat dipengaruhi oleh dinamika politik lokal dan kepentingan partai.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap pejabat partai politik, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan olahraga. Selain itu, analisis kebijakan dilakukan untuk memahami bagaimana partai politik membentuk kebijakan olahraga di tingkat provinsi.

Perbedaan dengan Penelitian penulis dengan Penelitian Nuraini berfokus pada peran partai politik dalam kebijakan olahraga di tingkat provinsi, sementara penelitian Anda berfokus pada proses politik yang lebih luas di tingkat kabupaten, dengan perhatian khusus pada interaksi antara pemerintah, organisasi pemuda, dan komunitas olahraga. Anda juga akan mengkaji lebih dalam bagaimana kebijakan kepemudaan dan olahraga

dibentuk melalui dinamika koalisi advokasi, yang tidak menjadi fokus utama dalam penelitian Nuraini.

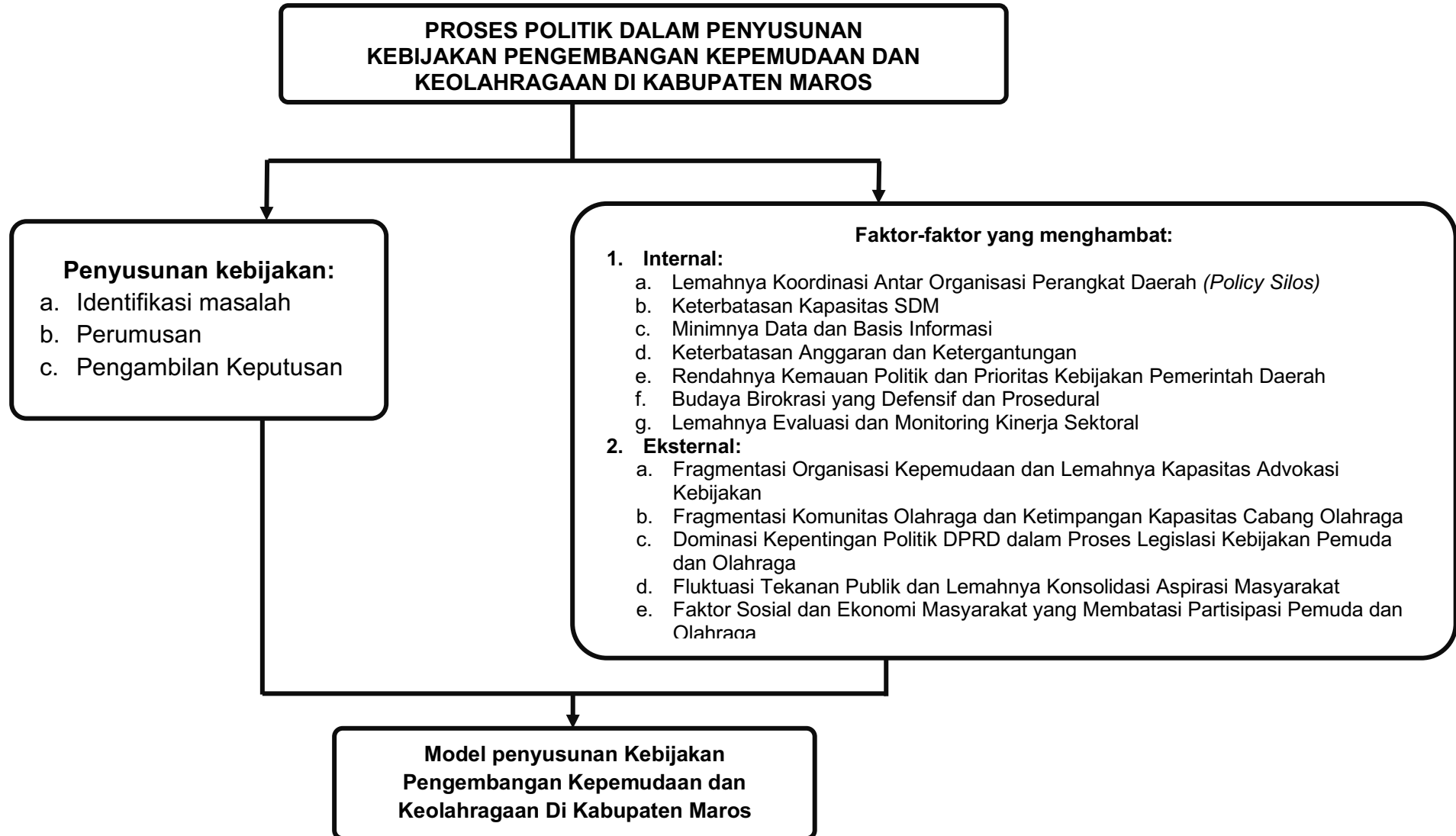
Penelitian penulis akan berfokus pada proses politik yang lebih luas dalam formulasi kebijakan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Maros, dengan menggunakan teori-teori kebijakan seperti Advocacy Coalition Framework, Policy Networks, dan Policy Cycle. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang sebagian besar mengevaluasi implementasi kebijakan atau peran aktor tertentu, penelitian Anda akan meneliti lebih dalam tentang bagaimana berbagai aktor berinteraksi dan berkoalisi dalam membentuk kebijakan. Anda juga akan mencakup aspek kepemudaan dan keolahragaan secara bersamaan, yang memberikan cakupan lebih luas dibandingkan penelitian-penelitian terdahulu.

#### **G. Skema Pikir**

Seperti yang telah diuraikan pada bagian pendahuluan, bahwa tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Proses Politik Formulasi Kebijakan Pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan Di Kabupaten Maros dalam framework teori politik. Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis harus memiliki *guidance* atau petunjuk maupun pedoman yang akan menuntun penulisan ini agar apa yang diharapkan dari penelitian dapat tercapai. Pada kerangka pikir ini tentunya penulis menempatkan

semua pertanyaan-pertanyaan yang ada pada rumusan masalah agar dapat diketahui apa yang menjadi indikator dalam mencapai tujuan penelitian. Seperti yang ada pada gambar dibawah ini

Gambar 1. 2. Skema Pikir



## H. Metodologi Penelitian

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam meneliti proses politik dalam Formulasi kebijakan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Maros, pendekatan yang tepat adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena atau peristiwa dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang tidak berbentuk angka atau statistik. Penelitian ini berfokus pada interpretasi, deskripsi, dan pemahaman mendalam tentang konteks sosial, budaya, dan pengalaman manusia.

Menurut Creswell, Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang berusaha untuk memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap fenomena yang diteliti, serta mengeksplorasi dan menggali pemahaman mendalam tentang konteks sosial dan budaya di mana fenomena tersebut terjadi. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman mendalam mengenai fenomena sosial dan politik yang terjadi di balik layar, khususnya dalam interaksi antaraktor politik yang terlibat dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti dapat mengeksplorasi motif, kepentingan, dan negosiasi yang

berlangsung dalam penyusunan kebijakan tersebut (Creswell, 2014:239-240).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode life story (kisah hidup). Life story digunakan untuk menggali secara mendalam pengalaman pribadi dan subjektif aktor-aktor utama yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Maros. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami dinamika proses politik dari sudut pandang pelaku yang terlibat langsung, termasuk motif, strategi, konflik, serta relasi kuasa yang membentuk keputusan kebijakan tersebut.

## 2. Objek dan Lokasi Penelitian

Dalam penelitian mengenai proses politik dalam formulasi kebijakan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Maros, Objek penelitian ini adalah narasi dan pengalaman hidup dari individu-individu yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan.

Lokasi penelitian adalah Kabupaten Maros, sebagai konteks tempat kebijakan kepemudaan dan keolahragaan tersebut dirumuskan. Kabupaten Maros menjadi area kajian yang strategis karena adanya dinamika politik lokal yang melibatkan berbagai aktor, seperti pemerintah daerah, DPRD,

organisasi kepemudaan, dan kelompok-kelompok olahraga. Penelitian akan dilakukan di instansi pemerintahan terkait, seperti Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Maros, serta lembaga-lembaga politik dan organisasi yang terlibat dalam formulasi kebijakan tersebut.

### 3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah menggali pengalaman hidup para aktor kunci yang menjadi bagian penting dalam proses formulasi hingga implementasi kebijakan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Maros. Fokus khusus akan diarahkan pada bagaimana mereka membentuk keputusan, mengatasi konflik, dan memaknai peran mereka dalam konteks kekuasaan dan kepentingan. Penelitian ini akan mengkaji faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi proses tersebut, termasuk peran pemerintah daerah, DPRD, organisasi kepemudaan, komunitas olahraga, dan masyarakat sipil.

#### a) Tahapan formulasi Kebijakan

- 1) Identifikasi Masalah: Melibatkan pengumpulan data dan identifikasi isu-isu yang relevan terkait dengan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Maros.

- 2) Perumusan Kebijakan: Menganalisis bagaimana alternatif kebijakan dirumuskan dan dibahas oleh para aktor yang terlibat.
- 3) Pengambilan Keputusan: Mengkaji proses politik dalam pengambilan keputusan, termasuk dinamika negosiasi dan kompromi yang terjadi antara aktor-aktor utama.

b) Proses Politik dalam Formulasi Kebijakan

Proses ini melibatkan berbagai aktor yang memiliki kepentingan dalam kebijakan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan, termasuk pemerintah daerah, DPRD, organisasi kepemudaan, komunitas olahraga, dan masyarakat sipil. Penelitian akan mengkaji bagaimana mereka berinteraksi, bernegosiasi, dan membentuk kebijakan.

c) Faktor Internal dan Eksternal

- 1) Faktor Internal, mencakup kapasitas pemerintah daerah, dinamika politik lokal, sumber daya yang tersedia, dan kemampuan birokrasi dalam merumuskan kebijakan yang efektif.
- 2) Faktor Eksternal, mencakup pengaruh lingkungan sosial, ekonomi, dan politik di luar pemerintahan, termasuk tekanan dari masyarakat sipil, media, dan organisasi non-pemerintah.

d) Model Formulasi Kebijakan

Fokus ini mengarah pada pengembangan model kebijakan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan Kabupaten Maros. Model ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam proses kebijakan di masa depan.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yakni data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari *Stakeholder* yang terlibat dalam proses politik dalam formulasi kebijakan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan di kabupaten maros
- b. Data sekunder merupakan data pendukung dari data primer, berupa dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, data statistik dan berbagai data kualitatif lainnya. Data sekunder dapat diperoleh melalui dokumen arsip, jurnal, referensi kepustakaan dan lain-lain. Sumber data melalui informan dalam penelitian ini yakni dilakukan secara sengaja (*purposive*).

## 5. Informan Penelitian

Metode pemilihan informan kunci yang dilakukan dalam kaitan dengan upaya memperoleh data kualitatif yakni menggunakan prinsip *purposive sampling* yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, digunakan untuk memilih informan dalam penelitian ini. Dalam arti informan kunci yang dipilih sengaja dilakukan karena pertimbangan bahwa mereka yang dipilih adalah mereka yang mengetahui dan memahami obyek yang diteliti. Beberapa komponen atau aspek yang berperan dalam memberikan metode untuk menciptakan kolaborasi internasional dengan negara lain, dalam hal ini, menjadi informan dalam penelitian ini. Purposive sampling digunakan dalam penelitian ini untuk memilih informan. Menurut Asrulla et al (2023: 26326) ini adalah strategi pengambilan sampel secara subjektif dengan tujuan atau sasaran tertentu yang mengasumsikan informan yang dipilih memiliki pengetahuan yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian. Adapun informan kunci yang dimaksud dalam penelitian adalah:

- 1) Pemerintah daerah
- 2) Anggota DPRD
- 3) Organisasi kepemudaan
- 4) Komunitas olahraga
- 5) Masyarakat sipil

Pemilihan kelima kelompok informan kunci tersebut tidak bersifat acak, melainkan secara teoritis didasarkan pada teori sistem politik David Easton (Easton, 1965; 1979), yang memandang sistem politik sebagai proses dinamis berupa input (tuntutan dan dukungan dari lingkungan masyarakat), konversi (proses pengolahan oleh aktor politik menjadi keputusan otoritatif), output (kebijakan publik), serta *feedback* (respons masyarakat terhadap output tersebut). Dalam konteks penelitian ini yang menganalisis proses politik formulasi kebijakan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Maros, teori Easton relevan karena menekankan bahwa proses kebijakan terjadi melalui interaksi multiaktor dalam "black box" konversi, di mana aktor-aktor utama berperan sebagai penyedia input, pelaku konversi, dan pemberi feedback.

Secara spesifik:

1. Pemerintah daerah (eksekutif, seperti Bupati/Wakil Bupati, Disparpora, dan Bappelitbangda) dipilih sebagai informan karena merupakan aktor sentral dalam proses konversi-mereka yang mengolah tuntutan menjadi kebijakan otoritatif dan mengalokasikan nilai (anggaran, program) sesuai visi-misi kepemimpinan.
2. Anggota DPRD dipilih karena berperan sebagai lembaga legislatif yang melakukan pengawasan, pengesahan

(misalnya dalam Musrenbang RPJMD), dan negosiasi dalam proses konversi, serta menjadi saluran dukungan atau tuntutan dari konstituen.

3. Organisasi kepemudaan (seperti KNPI, OKP, atau kelompok pemuda berbasis agama/pendidikan) dipilih sebagai aktor yang mewakili tuntutan (demands) dan dukungan (support) dari kelompok kepentingan pemuda-mereka yang mengartikulasikan aspirasi kepemudaan ke dalam agenda kebijakan.
4. Komunitas olahraga (seperti KONI, klub olahraga lokal, atau komunitas olahraga masyarakat) dipilih karena berfungsi sebagai kelompok kepentingan yang memberikan input spesifik terkait prasarana, prestasi, dan pengembangan karakter melalui olahraga, serta memberikan feedback terhadap implementasi kebijakan.
5. Masyarakat sipil (tokoh masyarakat, aktivis pemuda, atau kelompok independen) dipilih sebagai sumber input langsung (tuntutan dari lingkungan sosial) dan feedback (respons terhadap output kebijakan), yang sering kali menjadi pendorong atau pengkritik proses politik jika kebijakan tidak responsif.

Dengan demikian, pemilihan informan ini selaras dengan kerangka teori sistem politik Easton, di mana penelitian tidak

hanya mengumpulkan data administratif, melainkan memetakan interaksi aktor dalam proses input-konversi-output-feedback untuk memahami bagaimana proses politik membentuk substansi kebijakan kepemudaan dan keolahragaan di tingkat daerah. Jumlah dan jenis informan dapat disesuaikan lebih lanjut berdasarkan saturasi data selama pengumpulan lapangan, dengan tetap mempertahankan kriteria purposive untuk memastikan representasi komprehensif dari berbagai arus dalam sistem politik lokal.

#### 6. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian proses politik dalam formulasi kebijakan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Maros meliputi beberapa alat utama yang disesuaikan dengan pendekatan kualitatif. Panduan wawancara mendalam digunakan untuk menggali informasi dari aktor-aktor kunci yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan, memungkinkan peneliti memperoleh wawasan mendalam tentang interaksi dan dinamika politik yang terjadi. Panduan observasi partisipatif membantu peneliti mencatat aktivitas nyata yang terjadi dalam sidang atau pertemuan terkait kebijakan, sedangkan panduan analisis dokumen dipakai untuk menilai dan memahami dokumen-dokumen penting, seperti peraturan dan laporan kebijakan.

Catatan lapangan juga merupakan instrumen penting untuk mencatat refleksi dan pengamatan selama penelitian berlangsung. Semua instrumen ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang kaya dan relevan dalam konteks proses politik yang diteliti.

## 7. Metode Pengumpulan

Metode pengumpulan data dalam penelitian proses politik dalam formulasi kebijakan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Maros melibatkan beberapa teknik pengumpulan data yang dirancang untuk menggali informasi yang mendalam dan komprehensif.

### a. Wawancara Mendalam (*In-depth Interviews*)

Wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh pemahaman dari aktor-aktor kunci yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan. Dengan metode ini, peneliti dapat menggali pandangan subjektif, motivasi, dan pengalaman dari individu-individu yang memainkan peran penting dalam proses kebijakan. Wawancara bersifat fleksibel dan terbuka, memungkinkan eksplorasi topik yang lebih mendalam sesuai dengan respons informan (Creswell, 2014:239-240).

### b. Observasi Partisipatif (*Participant Observation*)

Melalui observasi partisipatif, peneliti dapat hadir dan terlibat dalam peristiwa-peristiwa yang relevan, seperti rapat

DPRD atau forum-forum kebijakan. Teknik ini memberi kesempatan bagi peneliti untuk melihat secara langsung interaksi antaraktor dan dinamika proses politik yang berlangsung. Observasi ini memungkinkan peneliti menangkap pola-pola perilaku yang mungkin tidak terungkap dalam wawancara (Yin, 2018:114).

c. Analisis Dokumen (*Document Analysis*)

Analisis dokumen dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen resmi yang relevan, seperti peraturan daerah, kebijakan yang telah disusun, dan laporan pemerintah. Dokumen-dokumen ini memberikan data obyektif mengenai kerangka kebijakan dan langkah-langkah administratif yang telah diambil, serta mencerminkan proses historis dari pembuatan kebijakan tersebut (Bowen, 2009:29).

d. Catatan Lapangan (*Field Notes*)

Catatan lapangan merupakan instrumen penting dalam penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan catatan ini untuk mendokumentasikan pengamatan langsung dan refleksi pribadi terkait interaksi sosial yang diamati selama wawancara atau observasi. Catatan ini membantu menambahkan dimensi interpretatif dalam analisis data, karena menangkap elemen-elemen yang tidak terstruktur dari pengalaman lapangan (Emerson, Fretz, & Shaw, 2011:12).

## 8. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah “upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna” (Noeng Muhadjir, 1998:104 dalam Rijali, 2018).

Dalam penelitian proses politik dalam formulasi kebijakan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Maros, teknik analisis data yang digunakan mengikuti pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami makna, pola, dan dinamika politik dalam formulasi kebijakan tersebut. Berikut adalah teknik-teknik analisis data yang digunakan:

### a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data di lapangan tentu berkaitan dengan teknik penggalian data, dan ia berkaitan pula dengan sumber dan jenis data, setidaknya sumber data dalam penelitian kualitatif berupa; (1) kata-kata dan (2) tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen atau sumber data tertulis, foto, dan statistik. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber

data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio tapes, pengambilan foto, atau film. Sedangkan sumber data tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi (Moleong, 2000:112-113 dalam Rijali, 2018).

b. Reduksi Data

Tahap awal analisis data melibatkan proses reduksi data, di mana peneliti memilah, menyederhanakan, dan memilih data yang relevan dari wawancara, observasi, dan dokumen yang telah dikumpulkan. Reduksi data dilakukan untuk mengidentifikasi informasi yang penting dan membuang data yang tidak relevan atau berlebihan. Data yang telah direduksi kemudian disusun dan dikategorikan berdasarkan tema atau isu yang terkait dengan proses politik formulasi kebijakan. Proses ini bertujuan untuk memfokuskan analisis dan memudahkan dalam menemukan pola pola utama (Miles & Huberman, 1994:10).

c. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah menyajikan data dalam bentuk yang lebih terstruktur, seperti tabel, diagram alur, atau peta konsep. Penyajian data ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam melihat

hubungan antar data, mengidentifikasi dinamika politik, serta melihat interaksi antaraktor yang terlibat dalam formulasi kebijakan. Dengan menampilkan data secara visual, peneliti dapat memperoleh gambaran lebih jelas mengenai proses politik yang sedang dianalisis (Miles & Huberman, 1994:91).

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Peneliti menafsirkan data yang telah disajikan dan menarik kesimpulan mengenai proses politik yang terlibat dalam formulasi kebijakan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan. Kesimpulan ini tidak bersifat final hingga dilakukan verifikasi melalui perbandingan dengan sumber data lainnya. Peneliti juga memeriksa validitas data melalui triangulasi, yaitu dengan membandingkan hasil dari wawancara, observasi, dan dokumen yang telah dianalisis untuk memastikan konsistensi dan keakuratan kesimpulan (Creswell, 2014:240).

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN**

Gambaran Umum Obyek Penelitian pada bagian ini disusun untuk memberikan konteks empiris yang komprehensif mengenai Kabupaten Maros sebagai lokasi penelitian. Uraian difokuskan pada struktur pemerintahan daerah sebagai kerangka kelembagaan tempat proses formulasi kebijakan berlangsung, kondisi kepemudaan sebagai subjek utama kebijakan, serta kebijakan daerah terkait kepemudaan yang menjadi objek analisis dalam penelitian ini. Penyajian ketiga aspek tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan keterkaitan antara konfigurasi kelembagaan pemerintah daerah, karakteristik sosial pemuda, dan arah kebijakan yang telah dirumuskan, sehingga menjadi landasan kontekstual yang penting bagi analisis proses politik dan dinamika kebijakan pada bab-bab selanjutnya.

#### **2.1. Struktur Pemerintahan Daerah Kabupaten Maros**

Pemerintah Kabupaten Maros menjalankan otoritas otonom untuk mengatur berbagai kepentingan masyarakat melalui sistem pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Bupati. Struktur pemerintahan ini bekerja dalam kerangka politik lokal yang dibentuk oleh dinamika sosial, aspirasi publik, dan tuntutan pembangunan. Pemerintah daerah menerima masukan dari masyarakat melalui saluran formal maupun informal yang kemudian diterjemahkan menjadi agenda kebijakan. Hubungan antara pemerintah dan

masyarakat terbentuk melalui dialog, partisipasi, serta interaksi politik sehari-hari. Keberadaan struktur pemerintahan daerah memungkinkan distribusi kewenangan yang lebih dekat dengan masyarakat. Sistem ini memberikan ruang bagi daerah untuk merumuskan kebijakan sesuai karakteristik lokal. Kondisi tersebut menciptakan dasar bagi kajian mendalam mengenai proses politik di Maros.

Kepala daerah memimpin seluruh perangkat pemerintahan untuk mengarahkan pembangunan melalui berbagai kebijakan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan. Bupati menentukan prioritas program dengan mempertimbangkan kebutuhan publik dan visi pembangunan jangka menengah. Perencanaan daerah dilakukan melalui mekanisme perumusan RPJMD, RKPD, serta forum musyawarah perencanaan pembangunan. Pemerintah daerah memanfaatkan dokumen ini sebagai pedoman bagi dinas-dinas dalam menyusun program. Kepemimpinan Bupati membentuk pola relasi antara birokrasi dan aktor masyarakat. Arah pembangunan dapat berubah mengikuti preferensi politik kepala daerah. Situasi ini menciptakan dinamika yang memengaruhi stabilitas kebijakan daerah.

Wakil Bupati turut membantu menjalankan pemerintahan dengan mengoordinasikan perangkat daerah agar selaras dengan kebijakan kepala daerah. Posisi Wakil Bupati memegang peranan

penting dalam membina hubungan kerja antar-dinas agar pelaksanaan program berjalan sesuai rencana. Dalam konteks pengembangan pemuda dan olahraga, Wakil Bupati dapat memberikan penguatan koordinasi lintas sektor. Fungsi ini penting karena urusan pemuda bersifat multidimensi dan melibatkan berbagai aktor. Pemerintah daerah memerlukan mekanisme koordinasi yang terstruktur untuk memastikan efektivitas kebijakan. Relasi antara Bupati dan Wakil Bupati memengaruhi kecepatan pengambilan keputusan. Kesesuaian pandangan mereka menentukan kelancaran pelaksanaan program publik.

DPRD Kabupaten Maros menjadi mitra strategis eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penentuan arah kebijakan. Lembaga legislatif menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk menilai kinerja eksekutif. DPRD memeriksa rancangan kebijakan yang diajukan pemerintah daerah melalui proses pembahasan di tingkat komisi dan rapat paripurna. Fraksi-fraksi dalam DPRD membawa perspektif politik yang mewakili konstituen masing-masing. Orientasi politik DPRD memengaruhi pembahasan kebijakan pemuda dan olahraga. Lembaga legislatif juga menilai efektivitas program dinas teknis berdasarkan hasil pengawasan. Fungsi pengawasan ini mendorong pemerintah daerah untuk bekerja lebih transparan.

Hubungan kerja antara eksekutif dan legislatif membentuk suatu arena negosiasi yang mewarnai proses formulasi kebijakan publik. Eksekutif mengajukan rancangan program yang kemudian dibahas bersama DPRD untuk mendapatkan persetujuan. DPRD memeriksa kelayakan program berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kapasitas anggaran daerah. Kedua lembaga saling membutuhkan untuk mewujudkan tujuan pembangunan. Negosiasi berlangsung melalui instrumen politik seperti rapat kerja, konsultasi antar-pimpinan, serta rekomendasi komisi. Ketegangan politik dapat muncul ketika kepentingan eksekutif dan legislatif tidak selaras. Proses ini menunjukkan bahwa pembentukan kebijakan merupakan hasil interaksi politik yang kompleks.

Struktur pemerintahan Kabupaten Maros ditopang oleh perangkat birokrasi yang berfungsi melaksanakan kebijakan dan menyediakan layanan publik. Perangkat daerah meliputi dinas-dinas yang memiliki tugas sesuai bidang masing-masing. Birokrasi menjalankan tanggung jawab teknis dengan mengacu pada arahan kepala daerah. Dalam konteks pembangunan, birokrasi menjadi tulang punggung dalam implementasi program di lapangan. Perangkat daerah menerima mandat dari pimpinan daerah untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai target. Efektivitas birokrasi sangat bergantung pada kapasitas sumber daya manusia yang

dimiliki. Kondisi ini menentukan kualitas layanan publik yang diterima masyarakat.

DISPARPORA sebagai perangkat daerah yang menangani urusan kepemudaan dan keolahragaan memegang posisi strategis dalam pembangunan sumber daya pemuda. Dinas ini bertanggung jawab mengelola program pembinaan, pemberdayaan, serta kegiatan olahraga di Kabupaten Maros. Penggabungan urusan pariwisata, pemuda, dan olahraga membuat cakupan tugas dinas menjadi sangat luas. Peran ini menuntut kemampuan manajerial yang kuat dari pimpinan dinas. Dinas memerlukan perencanaan komprehensif agar seluruh urusan dapat ditangani dengan baik. Keterbatasan sumber daya mempengaruhi kualitas pelaksanaan program di lapangan. Tantangan tersebut menjadi bagian penting dalam proses politik kebijakan.

DISPARPORA menyusun program berdasarkan analisis kebutuhan pemuda dan komunitas olahraga di wilayah Kabupaten Maros. Dinas melakukan identifikasi masalah melalui koordinasi dengan kecamatan, desa, organisasi pemuda, dan komunitas olahraga. Informasi yang terkumpul menjadi dasar formulasi kegiatan pembinaan, pelatihan, dan fasilitasi. Program dirancang untuk memberikan manfaat yang relevan dengan kondisi sosial pemuda. Dinas juga memetakan kebutuhan infrastruktur olahraga dan fasilitas pendukung kegiatan kepemudaan. formulasi kegiatan

disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ditetapkan pemerintah daerah. Situasi ini menuntut dinas bekerja dengan prioritas yang jelas.

Kapasitas sumber daya manusia di DISPARPORA sangat menentukan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program kepemudaan serta olahraga. Pegawai dinas berasal dari berbagai latar belakang sehingga tidak semua memiliki kompetensi teknis yang dibutuhkan. Kondisi ini membuat proses pembinaan pemuda membutuhkan dukungan eksternal dari pelatih, narasumber, atau komunitas. Dinas menghadapi tuntutan untuk meningkatkan kemampuan staf agar mampu menjalankan program secara profesional. Tantangan kapasitas ini memengaruhi ketepatan formulasi kebijakan sektor pemuda. Pelaksanaan kegiatan olahraga juga membutuhkan keahlian teknis yang tidak selalu tersedia pada pegawai. Situasi ini mempengaruhi efektivitas program pemerintah.

Kondisi anggaran yang terbatas membuat DISPARPORA harus memilih kegiatan prioritas yang sesuai kebutuhan mendesak masyarakat. Dinas menghadapi tekanan untuk menyediakan program yang menjangkau seluruh wilayah meskipun kemampuan finansial tidak memadai. Alokasi anggaran untuk sektor kepemudaan dan olahraga sering berada di bawah kebutuhan ideal. Keterbatasan ini menciptakan ruang negosiasi antara dinas dan eksekutif dalam perumusan anggaran. DPRD turut menilai anggaran tersebut untuk

memastikan penggunaan dana publik sesuai kepentingan masyarakat. Situasi ini menyebabkan beberapa program strategis belum dapat dijalankan secara optimal. Kondisi tersebut menjadi salah satu penghambat dalam pengembangan pemuda.

DISPARPORA berperan sebagai wadah interaksi antara pemerintah daerah dan organisasi kepemudaan yang ingin menyampaikan aspirasi. Dinas membuka ruang diskusi melalui forum dialog, pembinaan organisasi, dan kegiatan konsultatif. Organisasi pemuda memanfaatkan ruang ini untuk mengemukakan kebutuhan terkait pelatihan, fasilitas, atau kegiatan pemberdayaan. Dinas menghimpun aspirasi tersebut sebagai bahan perumusan program tahunan. Kedekatan interaksi ini membangun hubungan yang bermanfaat bagi dinas dan pemuda. Peran fasilitasi tersebut menempatkan dinas pada posisi strategis dalam siklus kebijakan. Situasi ini menunjukkan bahwa kepentingan pemuda sangat bergantung pada efektivitas fungsi dinas.

Komunitas olahraga juga menjadi aktor penting yang berinteraksi dengan DISPARPORA dalam formulasi program pembinaan atlet dan penyelenggaraan kegiatan olahraga. Komunitas menyampaikan aspirasi mengenai sarana latihan, pelatih, dan kompetisi. Dinas mempertimbangkan aspirasi tersebut untuk mengembangkan program pembinaan olahraga daerah. Interaksi ini membantu pemerintah memahami kebutuhan komunitas

olahraga secara lebih mendalam. Kerjasama antara dinas dan komunitas memperkuat efektivitas kegiatan olahraga. Partisipasi komunitas menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan olahraga yang dinamis. Hubungan ini menunjukkan pentingnya jaringan kebijakan dalam sektor olahraga.

Proses politik formulasi kebijakan kepemudaan dan keolahragaan di Maros dipengaruhi oleh tarik-menarik kepentingan antaraktor yang terlibat dalam proses perencanaan. Eksekutif menilai urgensi program berdasarkan arah pembangunan daerah. DPRD mengkaji kepentingan pemuda melalui perspektif politik masing-masing fraksi. DISPARPORA kemudian berperan sebagai penghubung antara birokrasi dan kelompok masyarakat. Interaksi ini menciptakan arena politik yang menentukan substansi kebijakan. Kontestasi kepentingan sering muncul ketika tuntutan masyarakat lebih besar dibanding kapasitas pemerintah. Situasi ini mencerminkan karakter pluralistik proses kebijakan lokal.

Kondisi geografis Kabupaten Maros memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembinaan pemuda dan olahraga. Wilayah yang terdiri atas kecamatan dengan karakteristik berbeda menuntut strategi pelayanan yang adaptif. Pemerintah daerah harus mengatur distribusi kegiatan berdasarkan konteks sosial masing-masing wilayah. DISPARPORA menghadapi tantangan mobilisasi kegiatan

yang menjangkau wilayah dengan akses sulit. Kondisi geografis ini mempengaruhi perencanaan program tahunan. Pemerintah daerah kemudian mempertimbangkan faktor wilayah dalam formulasi kebijakan. Tantangan tersebut memperlihatkan hubungan antara kondisi geografis dan kebijakan publik.

Struktur pemerintahan Kabupaten Maros membentuk fondasi kelembagaan bagi keseluruhan proses formulasi kebijakan kepemudaan dan keolahragaan. Eksekutif memimpin arah kebijakan, legislatif menjalankan fungsi kontrol, dan DISPARPORA mengoperasionalkan program. Hubungan ketiga elemen ini mempengaruhi keberhasilan kebijakan yang ditetapkan. Keterpaduan antaraktor menentukan kemampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pemuda. Proses kebijakan membutuhkan dukungan kelembagaan yang kuat untuk menjalankan program secara efektif. Fondasi ini menjadi dasar bagi analisis yang lebih mendalam mengenai dinamika proses politik di Maros. Struktur pemerintahan tersebut berperan sebagai kerangka besar bagi bab-bab selanjutnya.

## **2.2. Kondisi Kepemudaan**

Kondisi kepemudaan di Kabupaten Maros menunjukkan dinamika sosial yang terus berkembang seiring perubahan demografi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah. Komposisi usia produktif yang besar menempatkan pemuda sebagai kelompok

strategis dalam pembangunan daerah. Pemerintah daerah memandang kelompok pemuda sebagai modal sosial yang penting bagi penguatan partisipasi publik. Lingkungan sosial Maros yang beragam menciptakan karakter pemuda yang berbeda antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Pemuda di wilayah perkotaan memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan teknologi. Pemuda di pedesaan menghadapi keterbatasan akses terhadap informasi dan fasilitas pendukung. Perbedaan konteks ini membentuk kebutuhan dan tantangan yang tidak seragam.

Pemerintah Kabupaten Maros mengidentifikasi kebutuhan pemuda melalui dialog yang dilakukan dalam berbagai forum partisipatif. Diskusi tersebut menunjukkan bahwa pemuda membutuhkan ruang untuk mengembangkan keterampilan, memperluas jaringan sosial, dan memperoleh akses terhadap kegiatan produktif. Banyak pemuda menyampaikan aspirasi untuk mendapatkan pelatihan wirausaha, penguatan organisasi, dan kesempatan mengikuti kegiatan kepemudaan. Kondisi ini menandakan bahwa pemuda memiliki keinginan kuat untuk terlibat dalam proses pembangunan daerah. Namun keterbatasan fasilitas dan anggaran dinas sering membatasi kemampuan pemerintah memenuhi seluruh aspirasi tersebut. Kesenjangan kebutuhan dan kapasitas pemerintah menciptakan ruang tuntutan yang terus muncul dari komunitas pemuda.

Organisasi kepemudaan di Maros berperan penting dalam mengembangkan potensi generasi muda melalui berbagai kegiatan sosial, pendidikan, dan advokasi. KNPI, Karang Taruna, komunitas hobi, dan organisasi berbasis keagamaan menjadi wadah bagi pemuda untuk berkumpul dan berkegiatan. Setiap organisasi memiliki fokus pembinaan yang berbeda sehingga memperkaya aktivitas sosial pemuda. Namun banyak organisasi masih menghadapi keterbatasan dalam manajemen, pendanaan, dan kemampuan mengembangkan program. Pemerintah daerah menilai organisasi kepemudaan membutuhkan pendampingan teknis yang berkelanjutan. Kondisi kelembagaan organisasi menentukan kemampuan mereka berpartisipasi dalam perumusan kebijakan. Situasi ini menjadikan pembinaan organisasi pemuda sebagai kebutuhan yang mendesak.

Karakteristik pemuda di Kabupaten Maros memperlihatkan variasi yang dipengaruhi oleh pendidikan, lingkungan keluarga, dan akses terhadap teknologi. Pemuda dengan pendidikan menengah ke atas menunjukkan minat tinggi terhadap isu-isu kewirausahaan, karier, dan teknologi informasi. Pemuda di wilayah pedesaan lebih banyak terlibat dalam pekerjaan sektor informal dan aktivitas berbasis komunitas. Perbedaan ini menciptakan variasi kebutuhan program antara wilayah berbeda. Pemerintah daerah berupaya merespons kebutuhan tersebut melalui pelatihan dan pembinaan

berbasis kecamatan. Tantangan muncul ketika program tidak mampu menjangkau seluruh wilayah secara merata. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan kebijakan yang lebih adaptif.

Akses terhadap pendidikan menjadi faktor penting yang memengaruhi kualitas kepemudaan di Kabupaten Maros. Pemuda di wilayah yang memiliki fasilitas pendidikan lengkap menunjukkan perkembangan kompetensi yang lebih baik. Namun pemuda di wilayah terpencil menghadapi keterbatasan akses, sehingga mengalami kesenjangan dalam kemampuan literasi dan keterampilan. Pemerintah daerah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai program, namun tantangan masih muncul pada ketersediaan tenaga pendidik dan fasilitas belajar. Pemuda membutuhkan akses terhadap kursus, pelatihan, dan kegiatan tambahan untuk memperkuat kompetensi. Kebutuhan ini menjadi salah satu tuntutan yang sering muncul dalam musyawarah pembangunan. Pemerintah kemudian memasukkan isu pendidikan pemuda ke dalam agenda kebijakan.

Kondisi sosial pemuda tidak terlepas dari situasi ekonomi keluarga yang memengaruhi partisipasi mereka dalam kegiatan kepemudaan. Pemuda dari keluarga dengan ekonomi stabil memiliki kesempatan lebih besar mengikuti kegiatan pelatihan dan pengembangan diri. Sementara pemuda dari keluarga bekerja menghadapi kendala waktu dan biaya sehingga sulit berpartisipasi.

Ketimpangan sosial ini menciptakan perbedaan tingkat keterlibatan pemuda dalam kegiatan publik. Pemerintah daerah menghadapi tantangan untuk menyediakan kegiatan yang inklusif bagi seluruh pemuda tanpa membedakan latar belakang ekonomi. Program bantuan pelatihan menjadi salah satu upaya menjembatani kesenjangan tersebut. Situasi ini menegaskan pentingnya kebijakan kepemudaan yang sensitif terhadap kondisi sosial.

Perubahan gaya hidup pemuda di Kabupaten Maros menunjukkan peningkatan penggunaan teknologi informasi sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari. Pemuda memanfaatkan media sosial untuk berkomunikasi, belajar, dan mengikuti perkembangan informasi. Pemerintah memandang perkembangan ini sebagai peluang untuk mengembangkan gerakan literasi digital. Dinas teknis kemudian menyusun rencana pelatihan digital untuk meningkatkan kapasitas pemuda. Namun kemampuan pemuda dalam memanfaatkan teknologi masih bervariasi antara wilayah. Perbedaan ini menunjukkan perlunya strategi pembinaan yang disesuaikan dengan tingkat literasi digital. Pemerintah daerah menilai teknologi sebagai instrumen penting dalam pembinaan generasi muda.

Relasi antara pemuda dan pemerintah daerah menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dan ruang dialog yang tersedia. Pemuda di Kabupaten Maros menginginkan

keterlibatan yang lebih besar dalam perencanaan program kepemudaan. Pemerintah membuka ruang partisipasi melalui forum konsultasi publik yang dilaksanakan dalam beberapa kesempatan. Namun tidak semua pemuda dapat hadir atau terlibat dalam forum tersebut karena keterbatasan akses. Situasi ini membuat sebagian pemuda merasa belum sepenuhnya terwakili dalam proses kebijakan. Pemerintah kemudian mendorong organisasi pemuda untuk menjadi saluran penyampaian aspirasi. Mekanisme ini memperlihatkan hubungan erat antara kapasitas organisasi dan partisipasi politik pemuda.

Lingkungan organisasi kepemudaan di Maros menunjukkan keragaman orientasi dan kapasitas, sehingga menciptakan ruang bagi kolaborasi antar-komunitas. Banyak organisasi menjalankan kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Namun organisasi juga menghadapi tantangan dalam menjaga keberlanjutan kegiatan karena keterbatasan sumber daya. Pemerintah menilai keberhasilan organisasi sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan internal. Organisasi dengan kepemimpinan kuat mampu menggerakkan anggota secara aktif. Situasi ini menunjukkan pentingnya pembinaan kepemimpinan pemuda sebagai bagian dari pembangunan daerah. Kebutuhan tersebut kemudian dipertimbangkan dalam perumusan kegiatan dinas.

Partisipasi pemuda dalam kegiatan publik menunjukkan peningkatan meskipun masih membutuhkan penguatan dalam beberapa aspek. Pemuda terlibat dalam kegiatan sosial, budaya, lingkungan, dan kegiatan keolahragaan. Namun tingkat partisipasi masih dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas dan ruang berkegiatan. Banyak komunitas pemuda menyampaikan perlunya ruang publik seperti balai pemuda atau arena kegiatan kreatif. Pemerintah daerah berupaya menyediakan fasilitas tersebut namun terkendala anggaran. Kondisi ini menciptakan tuntutan tambahan terhadap sektor kepemudaan. Kebutuhan ruang kreatif menjadi salah satu isu strategis dalam kebijakan pemuda.

Kondisi ekonomi yang beragam memengaruhi peluang kerja bagi pemuda di Kabupaten Maros. Banyak pemuda menghadapi tantangan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai keterampilan. Pemerintah daerah menyadari perlunya pelatihan keterampilan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya pemuda. Dinas teknis mulai mengembangkan pelatihan berbasis kewirausahaan dan pengembangan kompetensi. Namun pelatihan tersebut belum mampu menjangkau seluruh pemuda karena keterbatasan anggaran dan tenaga pelatih. Tantangan ini menciptakan kesenjangan antara kebutuhan pemuda dan program yang tersedia. Pemerintah kemudian mempertimbangkan penguatan kerja sama dengan sektor swasta.

Hubungan antara pemuda dan lingkungan keluarga juga memengaruhi pola pembinaan yang dilakukan pemerintah. Keluarga berperan sebagai sumber dukungan utama bagi pemuda dalam kegiatan pendidikan dan sosial. Namun sebagian keluarga menghadapi keterbatasan waktu dan kemampuan untuk membimbing anak-anak mereka. Situasi ini mempengaruhi perkembangan karakter pemuda di beberapa wilayah. Pemerintah daerah melihat perlunya program pembinaan karakter sebagai bagian dari strategi pengembangan pemuda. Dinas teknis kemudian merancang kegiatan yang melibatkan sekolah, komunitas, dan organisasi pemuda. Pendekatan ini membantu memperkuat peran keluarga dalam pembinaan generasi muda.

Identitas sosial pemuda di Maros terus berkembang mengikuti perubahan sosial dan arus budaya luar. Pemuda mengadopsi gaya hidup modern yang dipengaruhi media sosial dan perkembangan budaya populer. Perubahan ini menciptakan orientasi baru dalam perilaku pemuda yang tidak selalu sejalan dengan nilai tradisional masyarakat. Pemerintah daerah melihat fenomena ini sebagai tantangan sekaligus peluang untuk memperkuat pembinaan nilai-nilai lokal. Program pembinaan budaya kemudian disusun untuk menyeimbangkan nilai lokal dan modernitas. Pemuda menunjukkan minat tinggi terhadap kegiatan seni dan budaya. Hal ini menunjukkan pentingnya integrasi pendekatan budaya dalam kebijakan pemuda.

Perubahan sosial ekonomi yang terjadi di Kabupaten Maros mendorong pemuda untuk beradaptasi dengan berbagai tantangan baru. Pemuda membutuhkan dukungan kebijakan yang mampu menjawab perubahan tersebut secara tepat. Pemerintah berupaya merespons kebutuhan ini melalui kegiatan pemberdayaan yang disesuaikan dengan karakteristik lokal. Namun dukungan kelembagaan yang dimiliki dinas masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasi program. Pemuda menginginkan keberlanjutan program yang dapat memberikan dampak jangka panjang. Pemerintah kemudian menilai kembali strategi pembinaan yang digunakan selama ini. Situasi ini menunjukkan pentingnya perencanaan kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika sosial pemuda.

Kondisi kepemudaan di Kabupaten Maros menggambarkan potret generasi muda yang memiliki potensi besar namun menghadapi berbagai keterbatasan. Pemuda menunjukkan antusiasme untuk terlibat dalam pembangunan daerah namun memerlukan dukungan kelembagaan yang lebih kuat. Pemerintah daerah perlu memperkuat kolaborasi dengan organisasi pemuda, sekolah, dan komunitas lokal. Pembinaan pemuda membutuhkan pendekatan multi-aktor agar program lebih efektif. Tantangan yang dihadapi pemuda memerlukan kebijakan komprehensif yang mampu menjawab kebutuhan jangka panjang. Situasi ini menegaskan peran

strategis kebijakan kepemudaan dalam pembangunan daerah. Penguatan sektor pemuda menjadi agenda penting dalam arah pembangunan Maros.

### **2.3. Kebijakan Daerah Terkait Kepemudaan di Kabupaten Maros**

Kebijakan kepemudaan di Kabupaten Maros berkembang melalui kerangka perencanaan pembangunan daerah yang berlandaskan visi dan misi pemerintah kabupaten. Pemerintah daerah menempatkan isu kepemudaan sebagai bagian dari agenda pembangunan sumber daya manusia. Dokumen perencanaan seperti RPJMD dan RKPD menjadi rujukan utama bagi formulasi program pembinaan pemuda. Pemerintah memandang pemuda sebagai potensi strategis yang perlu diberdayakan agar mampu berkontribusi dalam pembangunan. Kebijakan daerah kemudian diarahkan pada peningkatan kapasitas pemuda melalui berbagai program pelatihan dan kegiatan kreatif. Pemerintah daerah berupaya menyesuaikan arah kebijakan kepemudaan dengan tantangan yang muncul dalam dinamika sosial. Kebijakan ini terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat.

RPJMD Kabupaten Maros memberikan kerangka kebijakan jangka menengah yang menempatkan pembangunan pemuda sebagai bagian dari sasaran pembangunan layanan publik. Pemerintah menetapkan target peningkatan kualitas sumber daya pemuda melalui pendidikan, pelatihan, dan perluasan ruang

partisipasi. Sasaran ini lahir dari analisis kondisi pemuda yang membutuhkan dukungan berbagai program pemberdayaan. RPJMD memuat strategi pengembangan komunitas pemuda melalui kolaborasi lintas perangkat daerah. Pemerintah ingin memastikan bahwa pemuda memiliki ruang untuk berkembang di berbagai sektor kehidupan. Kerangka kebijakan ini kemudian menjadi pedoman bagi penyusunan Renstra dinas yang bertanggung jawab. Integrasi kebijakan tersebut memperlihatkan perhatian pemerintah pada sektor kepemudaan.

Renstra DISPARPORA menjadi dokumen yang paling langsung memengaruhi pembinaan pemuda di Kabupaten Maros. Renstra tersebut menetapkan indikator kinerja dan program prioritas untuk lima tahun. Pemerintah daerah mengarahkan dinas untuk mengembangkan kegiatan pemberdayaan, pelatihan keterampilan, dan program kreativitas pemuda. Renstra juga menekankan peningkatan kolaborasi dengan organisasi kepemudaan agar kegiatan pembinaan lebih tepat sasaran. Penyusunan Renstra dilakukan melalui proses analisis kebutuhan yang melibatkan pemangku kepentingan. Dinas kemudian merancang program berdasarkan kemampuan anggaran dan kapasitas sumber daya manusia. Renstra ini menjadi landasan operasional bagi seluruh kegiatan kepemudaan di Maros.

Kebijakan kepemudaan juga berkembang melalui rancangan peraturan daerah yang disusun pemerintah bersama DPRD. Penyusunan Ranperda Kepemudaan mencerminkan upaya pemerintah untuk memberikan payung hukum bagi pembinaan pemuda. Keberadaan peraturan tersebut penting karena dapat memperkuat legalitas program dan menetapkan kejelasan kelembagaan. Pemerintah ingin memastikan bahwa pelayanan kepemudaan berjalan dengan dasar hukum yang kuat. Ranperda dirancang untuk mengatur peran pemerintah, organisasi, dan masyarakat dalam pembinaan pemuda. Proses legislasi tersebut melibatkan masukan dari berbagai aktor termasuk organisasi pemuda. Upaya ini menunjukkan peningkatan perhatian pemerintah terhadap sektor kepemudaan.

Rancangan kebijakan tersebut kemudian dibahas dalam proses politik yang mempertemukan eksekutif dan legislatif. Pemerintah mengajukan naskah akademik dan draft peraturan untuk dinilai DPRD. Pembahasan berlangsung melalui rapat-rapat komisi dan forum dengar pendapat. DPRD menilai substansi kebijakan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan prinsip efektivitas. Pembahasan tersebut membuka ruang bagi kelompok kepemudaan untuk memberikan masukan melalui lembaga representasi. Pemerintah daerah memanfaatkan proses ini untuk menyesuaikan kebijakan dengan aspirasi publik. Dinamika pembahasan

mencerminkan karakter pluralistik proses kebijakan di Maros. Proses ini menjadi titik penting dalam pembentukan arah kebijakan pemuda.

Selain peraturan daerah, pemerintah Kabupaten Maros juga mengeluarkan kebijakan kepemudaan dalam bentuk Peraturan Bupati yang mengatur mekanisme teknis pelaksanaan program. Perbup digunakan untuk mengatur tata cara pelaksanaan kegiatan, koordinasi antar-dinas, dan mekanisme pendampingan organisasi pemuda. Pemerintah menggunakan instrumen ini untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai pedoman. Perbup memberikan kejelasan prosedural bagi perangkat daerah dalam menjalankan tugas pembinaan pemuda. Instrumen kebijakan ini mempermudah pelaksanaan program di lapangan. Perbup juga membantu mengatasi hambatan birokrasi dalam implementasi program. Peran Perbup menjadi penting dalam mendukung efektivitas kebijakan daerah.

Kebijakan kepemudaan di Kabupaten Maros juga memperhatikan kebutuhan peningkatan kompetensi pemuda di bidang kewirausahaan. Pemerintah mengarahkan program pemberdayaan untuk mendukung pemuda agar dapat menciptakan peluang ekonomi mandiri. Kegiatan pelatihan keterampilan kerja menjadi bagian dari strategi pembangunan pemuda. Pemerintah melibatkan lembaga pendidikan, dunia usaha, dan komunitas lokal untuk memperkuat ekosistem wirausaha pemuda. Kerja sama ini

membantu memperluas akses terhadap informasi dan pelatihan. Program tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan pemuda agar mampu bersaing di pasar kerja. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mengurangi pengangguran pemuda.

Program pembinaan karakter menjadi salah satu fokus kebijakan kepemudaan yang dijalankan pemerintah Kabupaten Maros. Pemerintah melihat pentingnya penguatan nilai-nilai moral dan sosial sebagai bagian dari pengembangan karakter pemuda. DISPARPORA bekerja sama dengan sekolah, organisasi keagamaan, dan komunitas untuk mengembangkan program pembinaan karakter. Program tersebut meliputi kegiatan sosial, pendidikan informal, dan pembinaan kepemimpinan. Tujuannya adalah membentuk pemuda yang memiliki integritas dan kepekaan sosial. Pemerintah menilai pembinaan karakter penting untuk memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Upaya ini dilakukan melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan banyak pihak.

Kebijakan daerah juga memberikan perhatian pada peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan melalui kegiatan kepemimpinan dan advokasi. Pemerintah ingin melahirkan generasi pemuda yang mampu berperan dalam proses perumusan kebijakan. Dinas teknis menyelenggarakan kegiatan pelatihan kepemimpinan, diskusi publik, dan forum konsultatif. Kegiatan ini menjadi ruang bagi pemuda untuk belajar berpendapat dan

berargumentasi. Pemerintah melihat partisipasi pemuda sebagai prasyarat bagi penguatan demokrasi lokal. Keterlibatan pemuda dalam forum publik kemudian mempengaruhi sikap organisasi pemuda dalam dinamika kebijakan. Program ini memperkuat kapasitas advokasi pemuda di wilayah Maros.

Literasi digital menjadi salah satu aspek kebijakan kepemudaan yang masuk dalam agenda pembangunan daerah. Pemerintah menyadari pentingnya keterampilan digital bagi pemuda dalam menghadapi perkembangan teknologi. DISPARPORA mengembangkan pelatihan digital yang mencakup penggunaan perangkat teknologi, komunikasi digital, dan keamanan siber. Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas pemuda agar mampu bersaing di era digital. Kebijakan ini disusun berdasarkan kebutuhan yang muncul dari perkembangan teknologi di masyarakat. Pemerintah daerah melibatkan sekolah dan lembaga pelatihan untuk memperluas cakupan kegiatan. Penguatan literasi digital menjadi landasan bagi pengembangan kreativitas pemuda.

Kebijakan kepemudaan di Kabupaten Maros juga diarahkan pada penguatan organisasi kepemudaan sebagai mitra strategis pemerintah. Organisasi pemuda merupakan wadah utama untuk menyalurkan aspirasi dan mengembangkan potensi generasi muda. Pemerintah menyediakan program pendampingan organisasi melalui pelatihan manajemen dan fasilitasi kegiatan. Upaya ini

bertujuan meningkatkan kapasitas organisasi agar mampu menjalankan peran secara efektif. Pemerintah menilai penguatan organisasi penting dalam menciptakan ruang partisipasi yang lebih luas. Organisasi yang kuat dapat menjadi mitra pemerintah dalam perumusan kebijakan. Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pengembangan kelembagaan pemuda.

Pelibatan komunitas lokal menjadi salah satu strategi pemerintah dalam memperkuat program kepemudaan. Pemerintah melihat komunitas sebagai lingkungan sosial yang efektif untuk pembinaan pemuda. DISPARPORA bekerja sama dengan komunitas seni, budaya, olahraga, dan lingkungan untuk mengembangkan kegiatan. Kerja sama ini membantu menjangkau pemuda di tingkat desa dan kelurahan. Program berbasis komunitas dinilai lebih mudah diterima oleh pemuda karena dekat dengan aktivitas sehari-hari. Pemerintah berupaya memperluas jaringan komunitas untuk meningkatkan daya jangkau program. Kebijakan berbasis komunitas ini memperkuat dimensi sosial pembangunan pemuda.

Kebijakan kepemudaan di Kabupaten Maros juga memfokuskan perhatian pada peningkatan akses pemuda terhadap ruang publik yang layak. Pemuda membutuhkan ruang untuk berkegiatan, berkumpul, dan mengembangkan kreativitas. Pemerintah berupaya menyediakan fasilitas seperti balai pemuda,

taman, dan arena kreatif. Namun keterbatasan anggaran membuat pembangunan fasilitas belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan. Pemerintah kemudian mendorong kolaborasi dengan desa, kecamatan, dan sektor swasta untuk menyediakan ruang kreatif bagi pemuda. Upaya ini dilakukan untuk memperkuat kapasitas kegiatan pemuda di tingkat lokal. Pemerintah memandang penyediaan ruang publik sebagai bagian penting dari kebijakan pemuda.

Peran pemerintah daerah dalam membentuk kebijakan kepemudaan juga terlihat melalui upaya memperluas jaringan kemitraan dengan dunia usaha dan lembaga pendidikan. Pemerintah memahami bahwa pembinaan pemuda memerlukan dukungan multipihak agar lebih efektif. Kemitraan ini membuka peluang bagi pemuda untuk mengakses pelatihan, magang, dan pembinaan profesional. Pemerintah berharap kolaborasi ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia lokal. Kerja sama lintas sektor kemudian menjadi bagian dari strategi kebijakan jangka panjang. Langkah ini memperkuat posisi pemuda dalam ekosistem pembangunan daerah. Pemerintah menilai kemitraan sebagai elemen penting dalam kebijakan kepemudaan.

Kebijakan daerah terkait kepemudaan di Kabupaten Maros secara umum menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengembangkan generasi muda sebagai aset pembangunan. Pemerintah menyusun kebijakan melalui pendekatan perencanaan,

regulasi, dan program kolaboratif. Tantangan yang dihadapi pemuda menjadi dasar bagi formulasi kebijakan yang lebih responsif. Pemerintah berupaya memperkuat kapasitas pemuda melalui pelatihan, pendampingan, dan penguatan organisasi. Kebijakan ini terus disesuaikan dengan dinamika sosial dan perkembangan teknologi. Pemerintah daerah menempatkan pemuda sebagai pilar pembangunan masa depan. Kebijakan tersebut menjadi bagian penting dalam arah pembangunan Kabupaten Maros.